

# Pengawasan Makroprudensial

---

**DSSK - 2018**

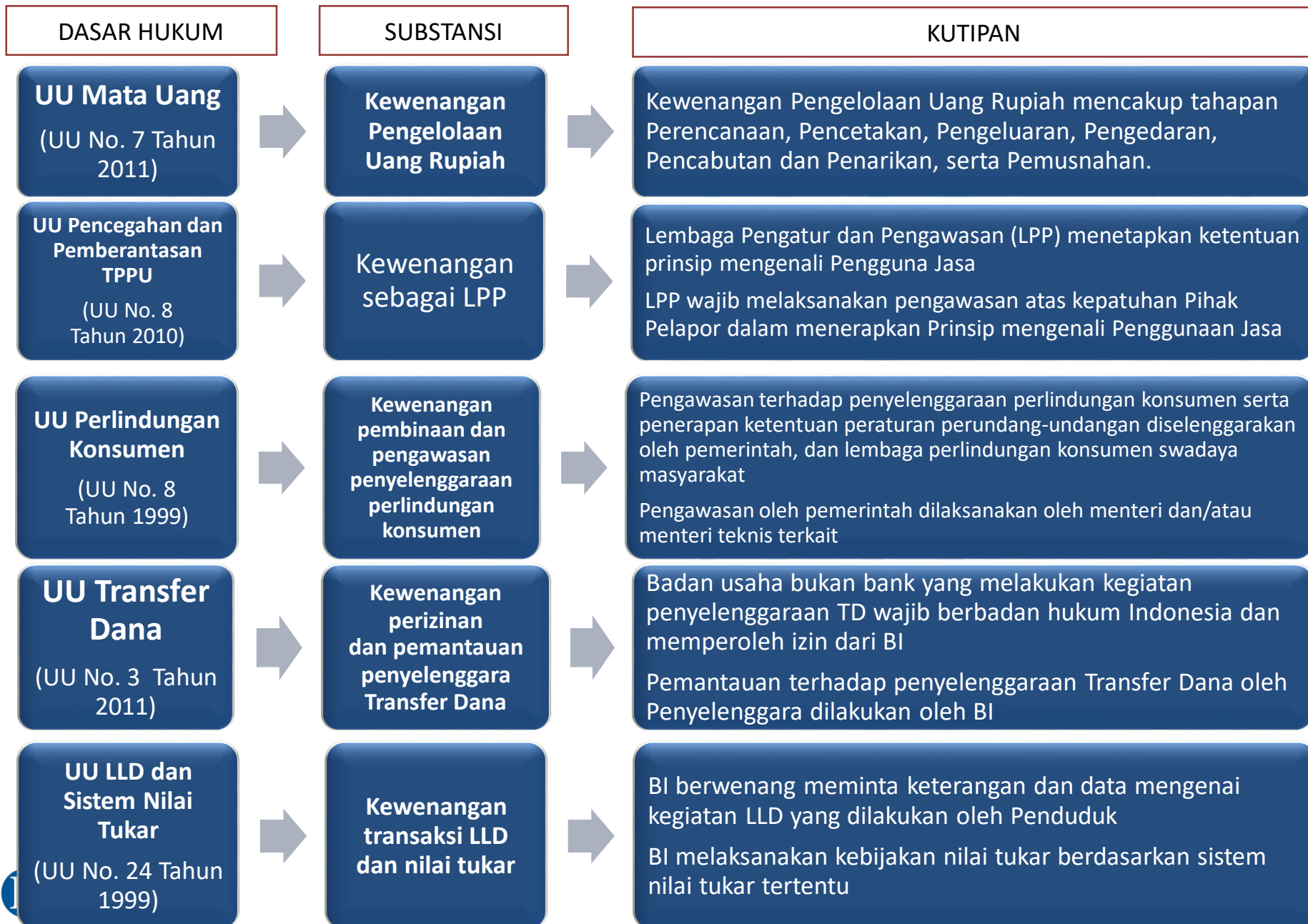
# OUTLINE:

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. KERANGKA PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. *SURVEILANS* : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. *SURVEILANS* : *ASSESSMENT TOOLS*
    - *Stress Test*
    - *Banking Industry Rating & Risk Register*
    - *Risk Register*
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER

# DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA



# DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA



# KEWENANGAN BANK INDONESIA



BI



OJK

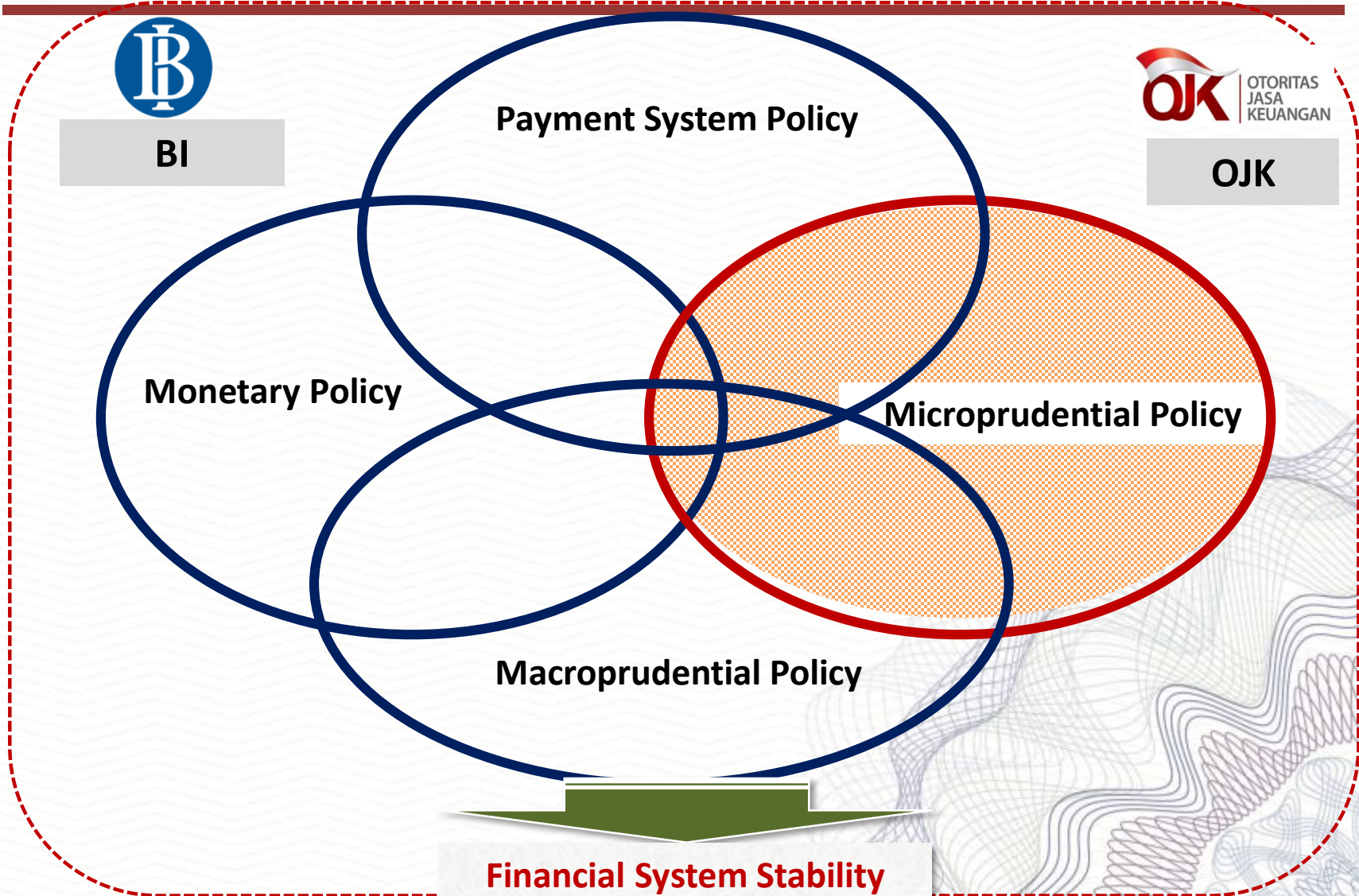
Payment System Policy

Monetary Policy

Microprudential Policy

Macroprudential Policy

Financial System Stability



# KETENTUAN BANK INDONESIA



## PENGAWASAN

PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

PBI No. 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter

PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan SP dan PUR

PDG No. 17/17/PDG/2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial

PDG No. 18/7/PDG/2016 tentang Kerangka Kerja Kebijakan Moneter BI

PDG No.18/5/PDG/2016 tentang Kerangka Kebijakan SP dan PUR

SE Intern No. 18/12/INTERN perihal Pedoman Pengawasan Makroprudensial

SE Intern No. 18/60/INTERN perihal Perumusan dan Penetapan kebijakan Moneter

SE Intern No.17/43/INTERN perihal Pedoman Teknis Pengawasan Kegiatan APMK dan UE  
SE Intern No.18/59/INTERN perihal Pedoman Teknis Pengawasan SP yang diselenggarakan oleh BI  
SE Intern No.18/115/INTERN/ perihal Perizinan dan Pelaporan Kegiatan PJPUR di BI  
PADG Intern No.19/38/PADG INTERN/2017 perihal Pedoman dan Perizinan KUPVA BB  
SE Intern No.16/34/INTERN/2014 perihal pedoman Umum Pelaksanaan Proses Perizinan dan Pengawasan Kegiatan PTD

Substansi : sumber instabilitas sistem keuangan, potensi risiko sistemik, instrumen makropru misal GWM LFR, LTV, CCB  
Obyek : Bank, LKBB, Korporasi, UMKM, RT, Pasar Keuangan, Infrastruktur Keuangan

Substansi : Inflasi, nilai tukar misal PUAB, cadev, LLD  
Obyek: Orang perseorangan, korporasi termasuk lembaga keuangan.

Subtansi : risiko, kepatuhan, perlindungan konsumen  
Obyek: Bank dan Lembaga Selain Bank yang menjadi PJSP, Pihak Penunjang, dan KLU

## PERLINDUNGAN KONSUMEN

PBI No.16/1/PBI/2016 tentang Perlindungan Konsumen Jasa SP

SE No.16/16/DKSP/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa SP

Subtansi : prinsip PK: keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data/informasi, penanganan pengaduan  
Obyek: penerbit instrument pemindahan/penarikan dana, penyelenggara transfer dana, APMK, UE, Penyediaan/penyetoran Uang Rupiah, lainnya

# KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sasaran kebijakan

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh iklim usaha kondusif serta kepercayaan konsumen dan masyarakat

Indikator kebijakan

Regulasi BI yang memberikan kepastian hukum dan sesuai *best practices*

Kepentingan konsumen produk/jasa berizin BI dan masyarakat yang terlindungi

Pilar

Peran BI yang efektif

Dukungan Industri

Keberdayaan Konsumen

Prinsip

Kesetaraan & Keadilan

Transparansi

Perlindungan data dan privasi

Perilaku bisnis yang bertanggungjawab

Penanganan & Penyelesaian Pengaduan yg Efektif

Kepedulian dan edukasi

Instrumen

Pengaturan

Pengawasan Market Conduct

Enforcement

Penanganan Pengaduan

Penyelesaian Sengketa

Literasi dan Edukasi

Infrastruktur dan Kelembagaan

# DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA – MAKROPRUDENSIAL

1. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



3. Peraturan Dewan Gubernur No.17/17/PDG/2015  
tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial

3. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang  
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

3. Surat Edaran Internal No.18/12/INTERN tentang  
Pedoman Pengawasan Makroprudensial



Mandat Pengaturan  
Makroprudensial

Mandat Pengawasan  
Makroprudensial



# DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA – MAKROPRUDENSIAL

## UU NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

**Kesimpulan Pasal 44 ayat (1):** Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara bersama-sama di dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) berwenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

**Penjelasan Pasal 7:** “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.”

**Kewenangan  
Pengaturan dan  
Pengawasan  
Makroprudensial**

**Kewenangan  
Pemeriksaan Bank**

**Penjelasan Pasal 40:** “Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk systemically important bank dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential.”

**Penjelasan Pasal 69:** “Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.”

**Kewenangan  
Pengaturan  
Makroprudensial**

## PBI NO.16/11/PBI/2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

**Wewenang Bank Indonesia mencakup Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial dalam rangka al. mencegah & mengurangi risiko sistemik, yaitu** potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).

# DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA – PILAR MAKROPRUDENSIAL

## Kebijakan dan Pengaturan Makroprudensial

---

- Pengaturan Makroprudensial diperlukan untuk mempengaruhi perilaku pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga SSK
- Kegiatan utama meliputi riset dan asesmen, penyusunan rekomendasi kebijakan, perumusan instrumen pengaturan, implementasi kebijakan, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan peraturan

## Pengawasan Makroprudensial

- Pengawasan Makroprudensial diperlukan untuk mendeteksi kerentanan dan ketidakseimbangan pada Sistem Keuangan yang dapat menimbulkan Risiko Sistemik Bank
- Kegiatan utama meliputi surveilans dan/atau pemeriksaan

## Pengembangan akses keuangan dan UMKM

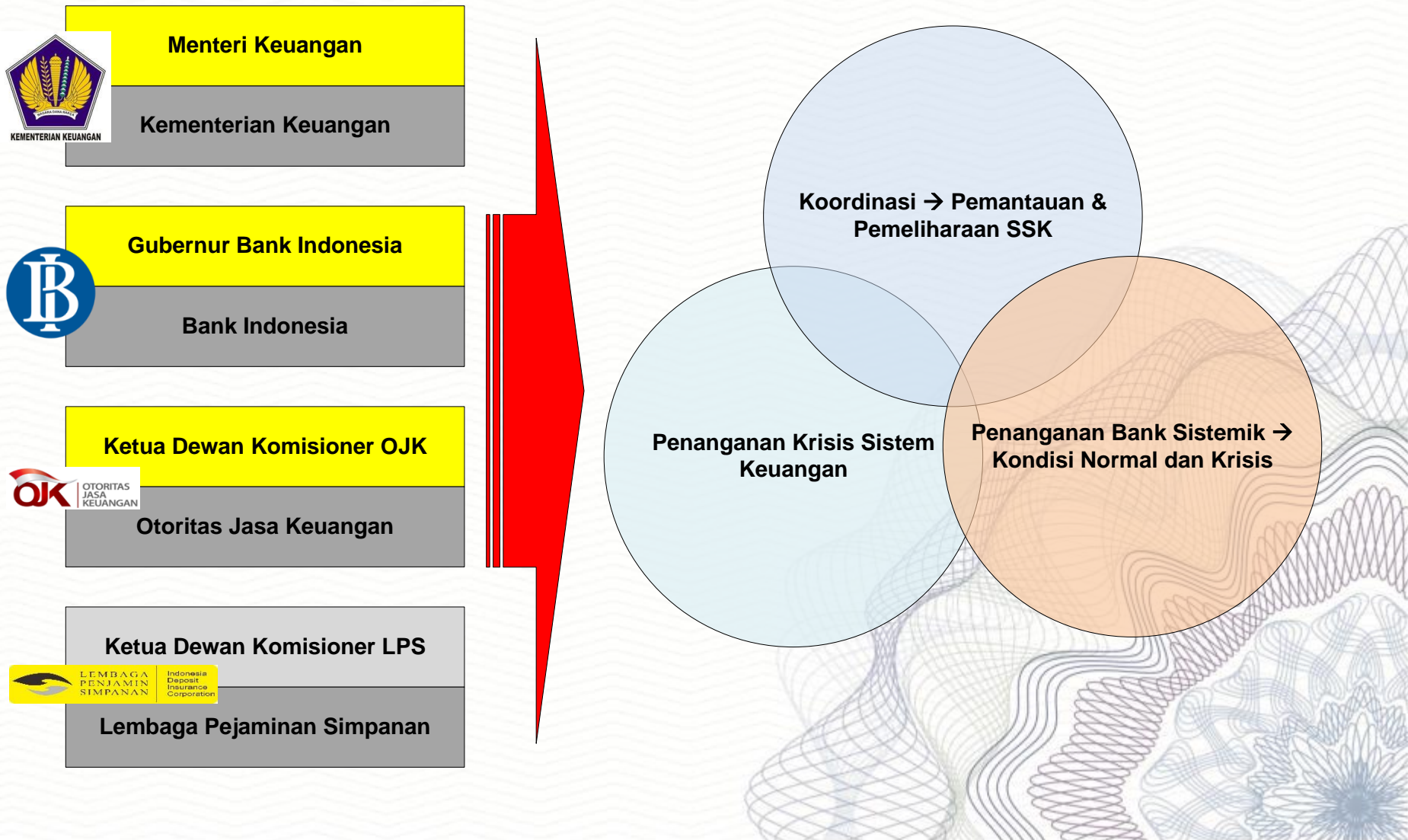
- Pengembangan akses keuangan dan UMKM diperlukan dalam rangka *financial broadening* yaitu meningkatnya akses keuangan masyarakat termasuk UMKM sekaligus memperluas jangkauan perbankan kepada semua lapisan masyarakat (*financial inclusion*)
- Kegiatan utama meliputi kegiatan sebagaimana pengaturan makroprudensial ditambah dengan upaya-upaya perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan, fasilitas intermediasi, peningkatan kapasitas, perlindungan konsumen, dll.

## Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*

## Koordinasi dengan otoritas dan/atau lembaga terkait

# DASAR HUKUM - MANDAT SSK

## Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Salah Satu Tugas Bank Indonesia

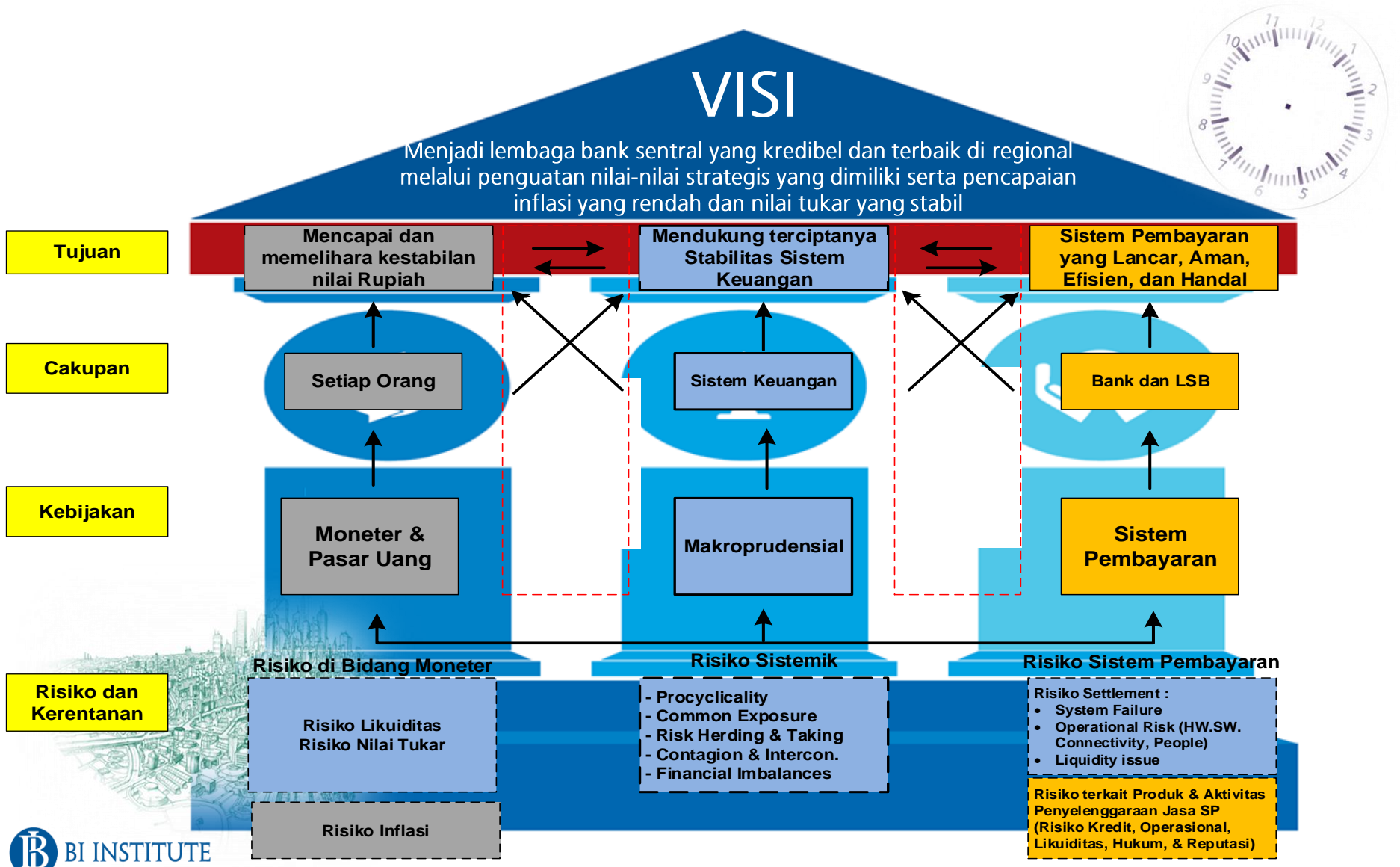


# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. **CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA**
  3. KERANGKA PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. *SURVEILANS* : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. *SURVEILANS* : *ASSESSMENT TOOLS*
    - *Stress Test*
    - *Banking Industry Rating & Risk Register*
    - *Risk Register*
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER

Setiap risiko yang menjadi fokus pengawasan pada setiap pilar berpotensi mempengaruhi fluktuasi risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan



# CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA – TUJUAN PENGAWASAN



## Kebijakan Makroprudensial & Mikroprudensial

### Mikroprudensial



Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.

### Makroprudensial



Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.

***“Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader approach is needed to safeguard the financial system”***

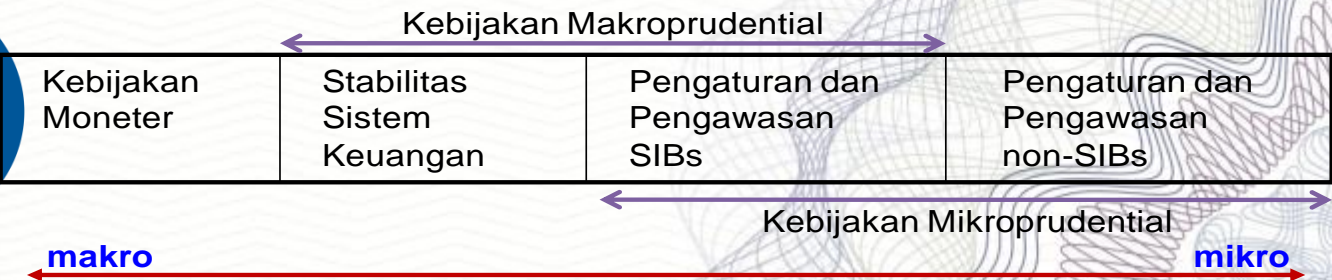
# CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA – PILAR MAKROPRUDENSIAL

## PERBEDAAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL DAN MIKROPRUDENSIAL

Konsep Makroprudensial dan Mikroprudensial - Borio (2009)

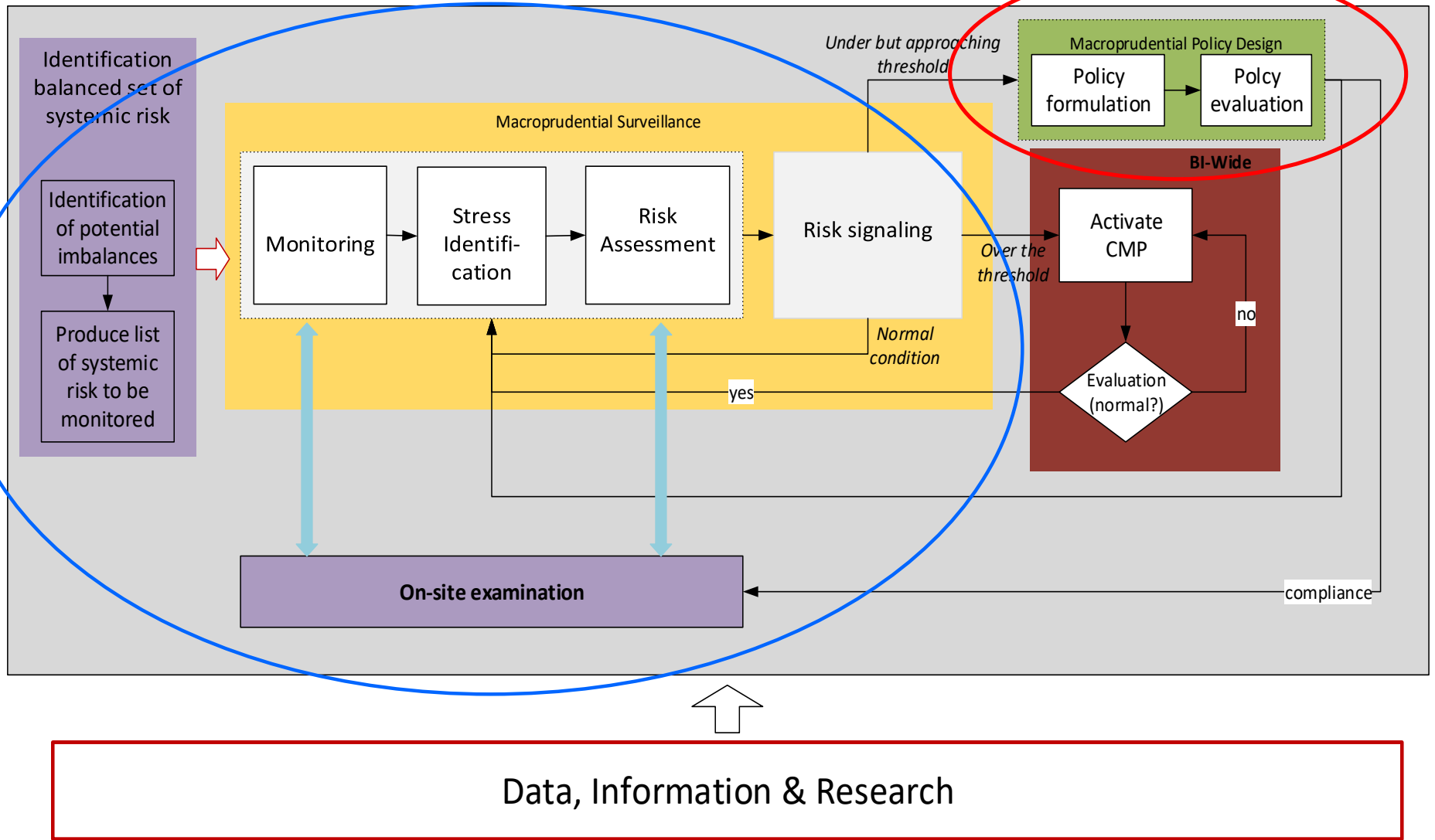
|   | Makroprudensial  | Mikroprudensial   |
|---|--|---|
| <b>Tujuan Antara</b>  | Pemantauan dan penilaian terhadap system keuangan secara keseluruhan           | Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan |
| <b>Tujuan Akhir</b>   | Menekan biaya krisis (penurunan PDB)   | Perlindungan konsumen   |
| <b>Korelasi &amp; eksposur lintas lembaga keuangan (<i>contagion</i>)</b> | Penting  | Tidak relevan   |
| <b>Kalibrasi kebijakan prudensial</b>                                     | Fokus pada risiko sistemik; Top down   | Fokus pada risiko individual lembaga keuangan; Bottom up              |
| <b>Fokus</b>  | Lembaga keuangan sistemik (Systemically Important Financial Institution/SIFIs) | Individu Lembaga keuangan   |

Bank Sentral





## OVERVIEW KERANGKA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL



# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. **KERANGKA PENGAWASAN BANK INDONESIA**
  4. *SURVEILANS* : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. *SURVEILANS* : *ASSESSMENT TOOLS*
    - *Stress Test*
    - *Banking Industry Rating & Risk Register*
    - *Risk Register*
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER

# SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA

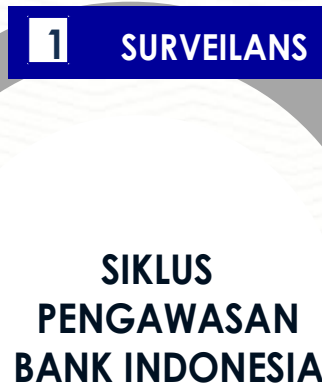
- Rekomendasi penyempurnaan kebijakan pada Satker terkait Makroprudensial, Moneter (termasuk Pasar Keuangan) dan Sistem Pembayaran
- Rekomendasi penguatan pengawasan
- Koordinasi dengan institusi/otoritas lain
- Pembinaan : Rekomendasi kepada Bank, Pengenaan Sanksi.

## EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

## PEMERIKSAAN

- TEMATIK (Makroprudensial, Moneter, dan SP)
- KEPATUHAN - Targeted

**LAPORAN SURVEILANS SISTEM KEUANGAN**  
Laporan Reguler/Periodik  
Laporan Insidental/Tematik  
Banking Industry Rating  
Risk Register  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**



### Monitoring

### Identifikasi

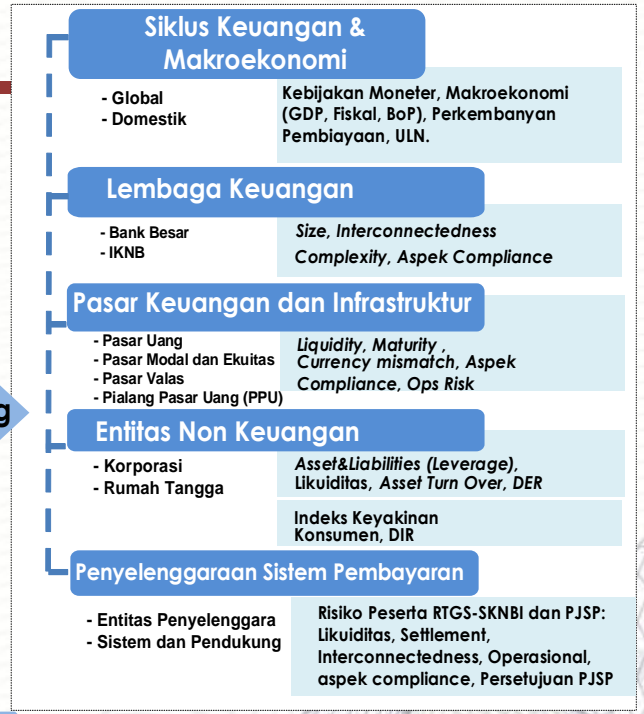
### Asesmen

**Asesmen Risiko Sistemik :**

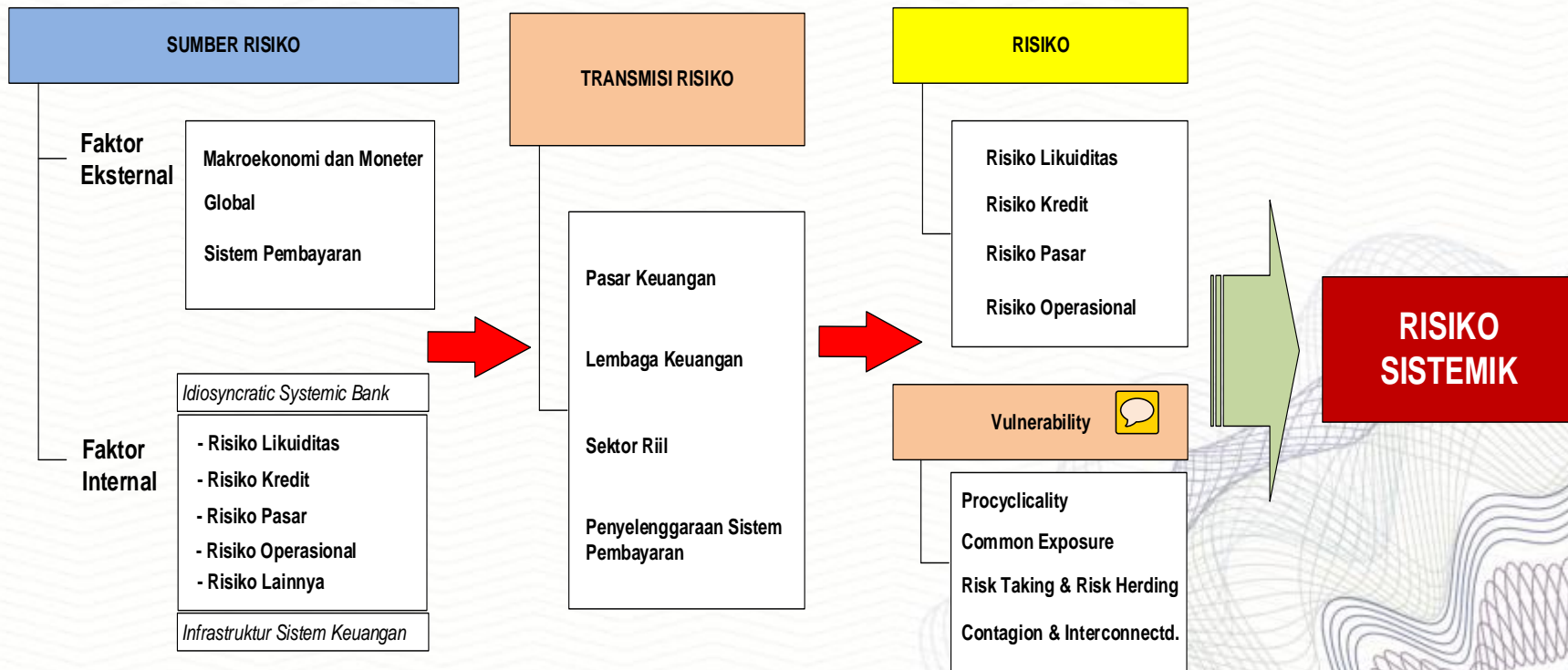
- Granular Stress Test
- Banking Industry Rating & Risk Register
- Network Analysis

**Asesmen Risiko Lain :**  
Risk Matrix

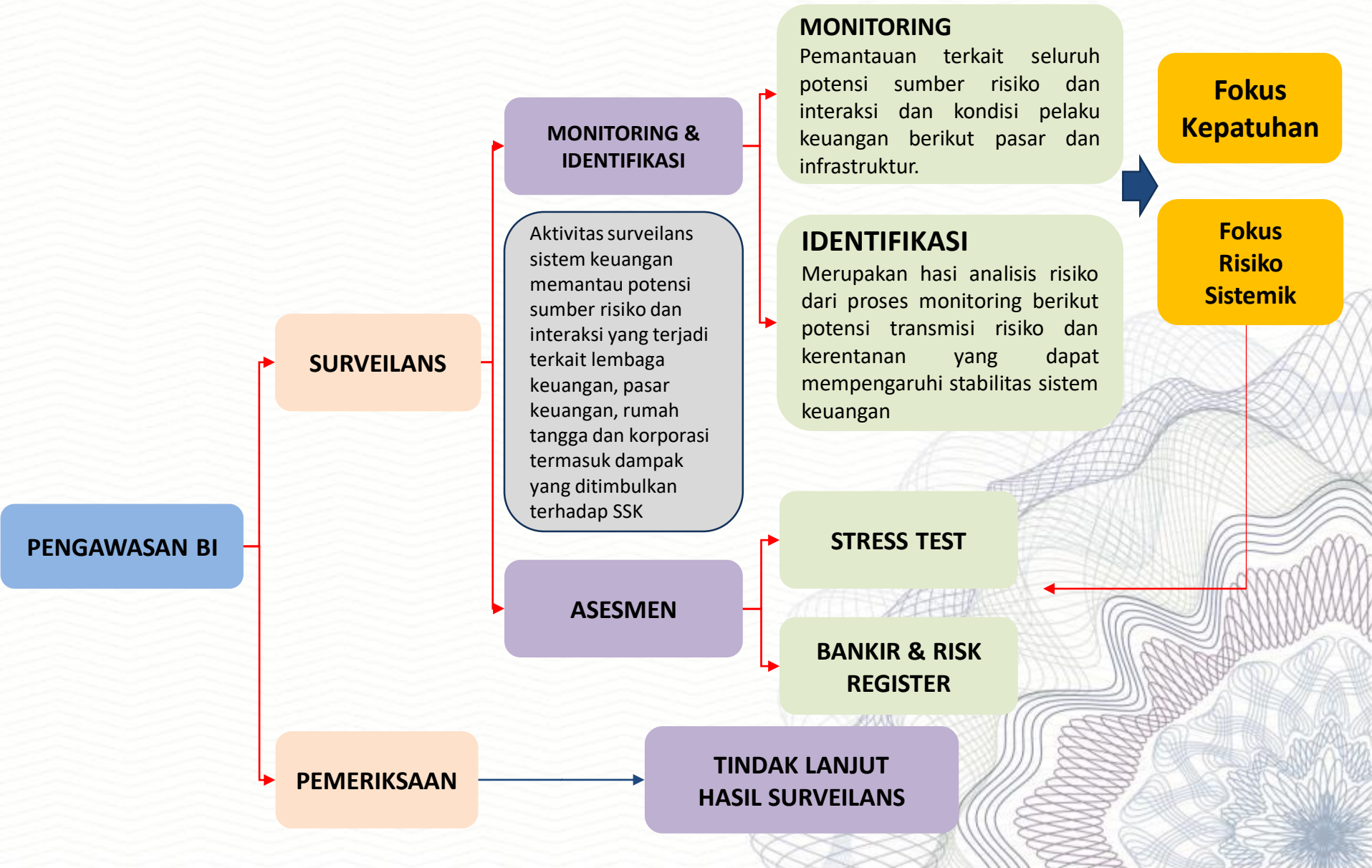
**Asesmen Tematik Lain & Kepatuhan**



# MINDMAP KERANGKA PENGAWASAN - DSSK



# PENGAWASAN BANK INDONESIA



# PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL BANK INDONESIA

PBI No.16/11/PBI/2014

- 1. SIB/bank lainnya
- 2. LK & non-LK yg berpotensi sistemik
- 3. Pasar & Infrastruktur keuangan
- 4. Household

Obyek

Proses

Kewajiban Bank

- 1. Pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan
- 2. Identifikasi & Analisis Risiko SK
- 3. Penilaian Risiko SK

- 1. Menyampaikan data/informasi
- 2. Memberikan konfirmasi & informasi tambahan
- 3. Melakukan koreksi atas kesalahan laporan

Elemen Surveillance

PEMANTAUAN (SURVEILLANCE)

Sebagai tindak lanjut Surveillance

Sebagai bahan masukan untuk surveillance selanjutnya

PEMERIKSAAN

Elemen Pemeriksaan

Obyek

Tujuan

Kewajiban Bank

- 1. SIB/bank lainnya
- 2. Perusahaan induk/afiliasi/anak dari Bank yg memberikan eksposur risiko signifikan/berpotensi sistemik.

- 1. Meyakini Risiko Sistemik
- 2. Meyakini implementasi kebijakan BI
- 3. Meyakini kewajiban data

- Memperlihatkan/memberikan:
- 1. Dokumen/data elektronik
  - 2. Keterangan/ penjelasan
  - 3. Hal-hal lain terkait pemeriksaan



# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. **SURVEILANS : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN**
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. **SURVEILANS : ASSESSMENT TOOLS**
    - *Stress Test*
    - *Banking Industry Rating & Risk Register*
    - *Risk Register*
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER
- 

# SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA

- Rekomendasi penyempurnaan kebijakan pada Satker terkait Makroprudensial, Moneter (termasuk Pasar Keuangan) dan Sistem Pembayaran
- Rekomendasi penguatan pengawasan
- Koordinasi dengan institusi/otoritas lain
- Pembinaan : Rekomendasi kepada Bank, Pengenaan Sanksi.

## EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 3

## PEMERIKSAAN 2

- TEMATIK (Makroprudensial, Moneter, dan SP)
- KEPATUHAN - Targeted

**LAPORAN SURVEILANS SISTEM KEUANGAN**  
 Laporan Reguler/Periodik  
 Laporan Insidental/Tematik  
 Banking Industry Rating  
 Risk Register  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

## 1 SURVEILANS

# SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA

Monitoring

Identifikasi

Asesmen

**Asesmen Risiko Sistemik :**

- Granular Stress Test
- Banking Industry Rating & Risk Register
- Network Analysis

**Asesmen Risiko Lain :**  
 Risk Matrix

**Asesmen Tematik Lain & Kepatuhan**

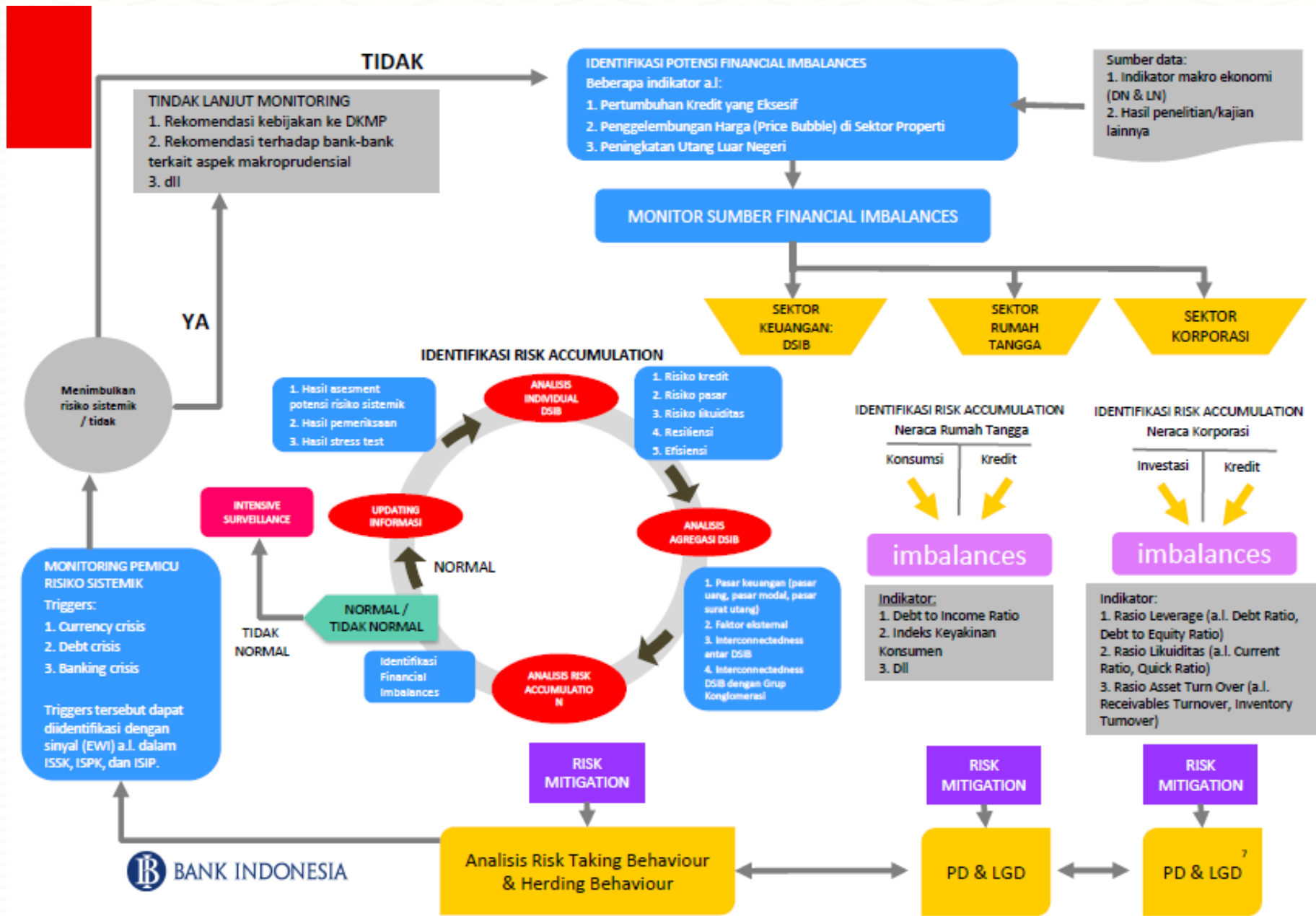
| Siklus Keuangan & Makroekonomi   |  |
|--|--|
| - Global<br>- Domestik   | Kebijakan Moneter, Makroekonomi (GDP, Fiskal, BoP), Perkembangan Pembiayaan, ULN.  |
| Lembaga Keuangan   |  |
| - Bank Besar<br>- IKNB   | Size, Interconnectedness<br>Complexity, Aspek Compliance   |
| Pasar Keuangan dan Infrastruktur   |  |
| - Pasar Uang<br>- Pasar Modal dan Ekuitas<br>- Pasar Valas<br>- Pialang Pasar Uang (PPU) | Liquidity, Maturity, Currency mismatch, Aspek Compliance, Ops Risk   |
| Entitas Non Keuangan   |  |
| - Korporasi<br>- Rumah Tangga  | Asset&Liabilities (Leverage), Likuiditas, Asset Turn Over, DER<br><br>Indeks Keyakinan Konsumen, DIR                           |
| Penyelenggaraan Sistem Pembayaran  |  |
| - Entitas Penyelenggara<br>- Sistem dan Pendukung  | Risiko Peserta RTGS-SKNBI dan PJSP: Likuiditas, Settlement, Interconnectedness, Operasional, aspek compliance, Peretujuan PJSP |

| RISIKO SISTEMIK   |   |
|---|---|
| Sumber Risiko Sistemik Dan Transmisi Risiko Sistemik  | Kerentanan  |
| Sumber Risiko dari Informasi EWI dan analisis sumber risiko prioritas<br><br>Sumber Risiko Lainnya, termasuk sumber risiko di bidang moneter & SP<br><br>Transmisi Risiko : Lembaga Keuangan, Sektor Riil, Pasar, Sistem Pembayaran | - Financial Imbalances<br>Procyclicality)<br><br>- Common Exposure<br><br>- Interconnectedness & Contagion effect dari idiosyncratic risk |

| RISIKO DI BID. MON  | RISIKO DI BID SP   | KEPATUHAN   |
|---|--|---|
| Risiko Moneter dari Interaksi Pelaku Sistem Keuangan<br><br>Aktivitas pasar uang dan pasar valas<br>Transaksi treasury bank<br>Lembaga pendukung. | <b>Prinsip Kehati-hatian Penyelenggara Jasa SP</b><br><br>Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran<br><br>Instrumen dan Produk Sistem Pembayaran | <b>Kelentuan Makroprudensial, Moneter, dan SP</b> |



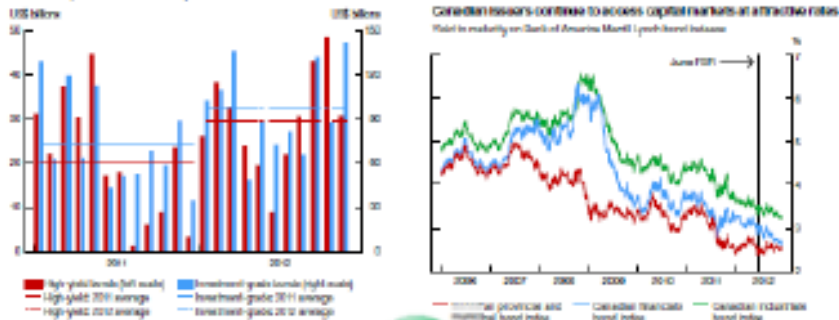
# MONITORING DAN IDENTIFIKASI RISIKO SISTEMIK



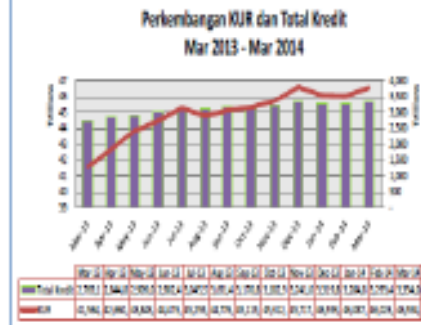
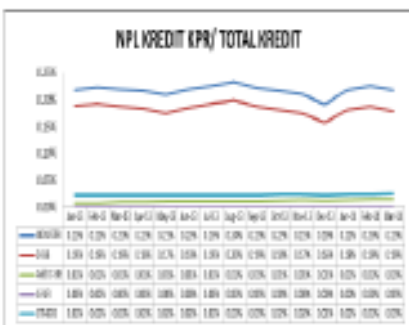
# PROSES ANALISIS

*“Proses dimulai dengan identifikasi sumber risiko yang relevan dengan Indonesia”*

## Top-down analysis of future trends and global macro-economy



## Bottom-up analysis of financial institutions' state and conditions



## 20 top risks identified

### Credit risk

- Crisis of confidence by consumers
- Operational failure at a financial institution
- Household loan default
- Insufficient capital
- Insufficient risk transfer
- Interconnectedness of institutions
- Large business failures
- Maturity mismatch

### Liquidity risk

- Change in asset values
- Insufficient liquidity

### Market risk

- Capital reversal outflow
- Change in commodity prices
- Change in FX
- Changes in interest rates
- Crisis of confidence by investors (investors and counterparties)

### Operational risk

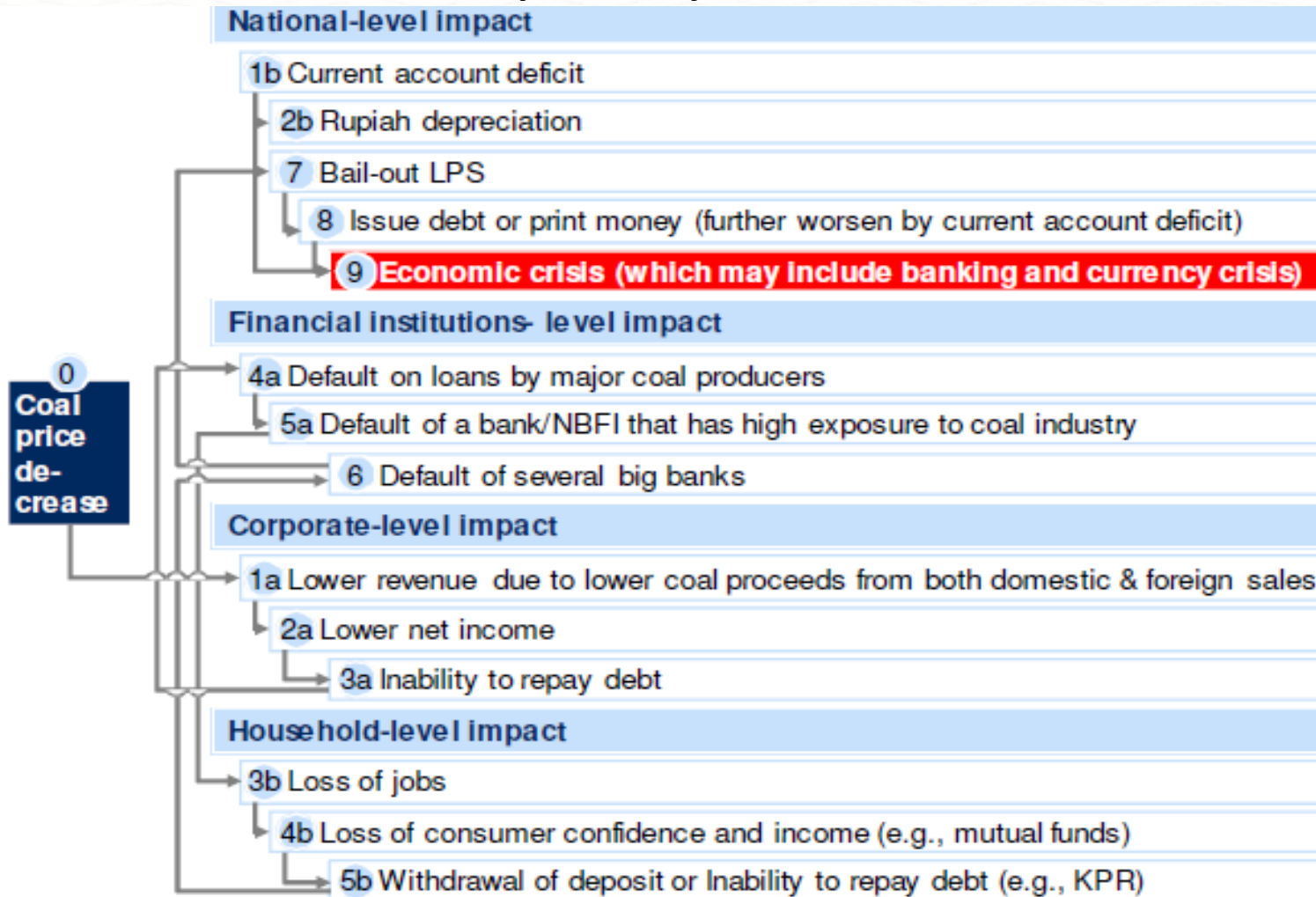
- Infrastructure fragilities
- Operational failure of a market or an exchange
- Payment system risks

### Others

- Natural disaster
- Product innovation

# TRANSMISI RISIKO

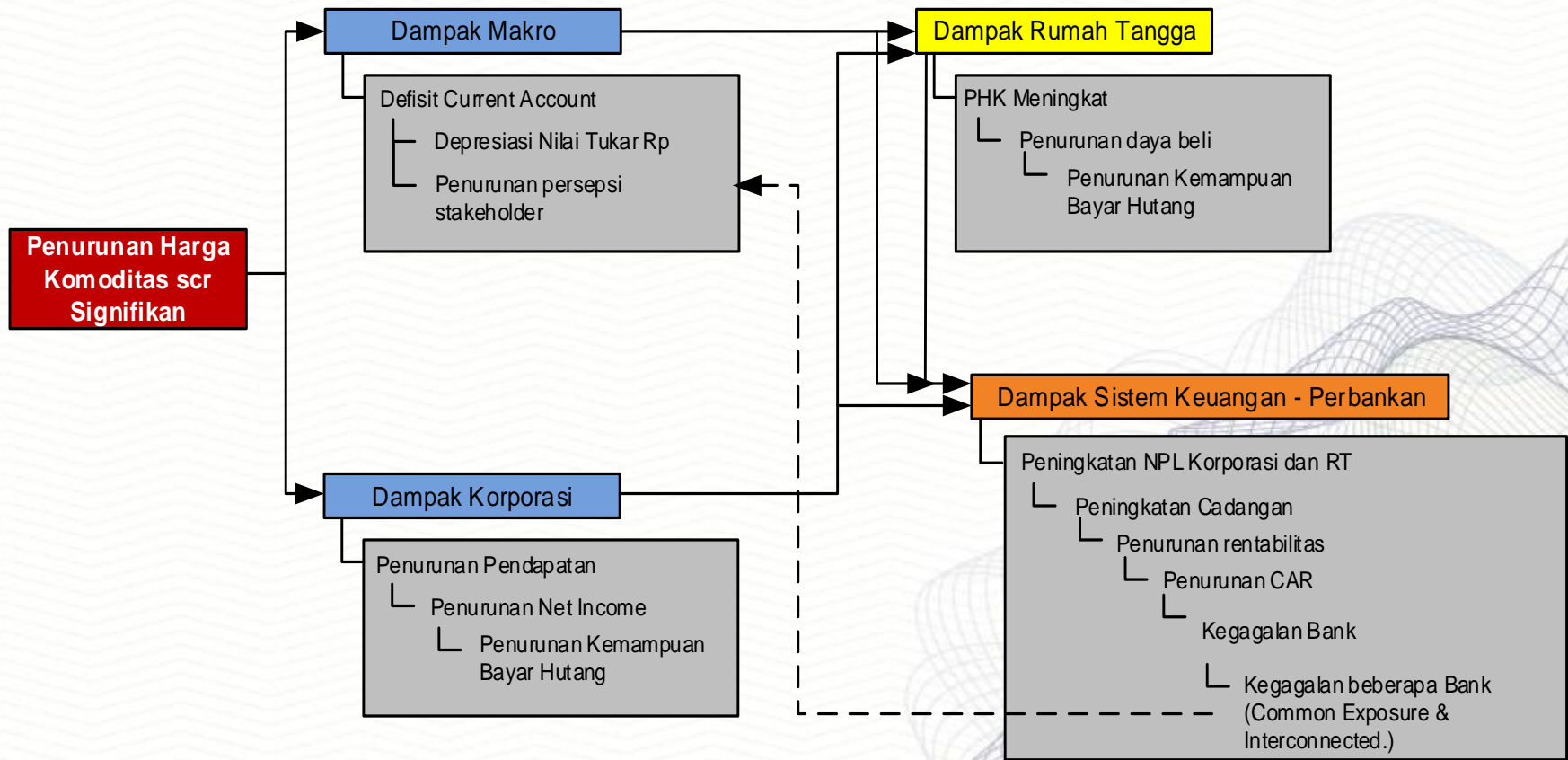
*“Mapping Transmisi dibutuhkan untuk memahami bagaimana suatu Risiko dapat menyebar/menjaral dalam Perekonomian”*



“It is important to assess transmission maps based on macro-economic cycle, as it is the interface between financial system and macro-economy that proves to be most harmful.”- Lord Adair Turner, ex-Chairman of FSA

# TRANSMISI RISIKO

Munculnya sumber risiko dari faktor eksternal dapat berdampak terhadap sistem keuangan, baik yang bersifat *first round impact* maupun dampak-dampak lanjutannya.



# PENETAPAN PRIORITAS FINANCIAL IMBALANCES DAN RISIKO SISTEMIK

*“Berdasarkan transmisi dan besarnya potensi dampak yg dapat ditimbulkan, dapat ditetapkan tingkat probability dan severity dari suatu shock”*

Ilustrasi

## Transmission mechanisms mapping of various risks...



## ...will be used to determine likelihood of shock and its severity

### Severity of shock

- Measured by answering several questions such as:
  - How much will GDP be reduced?
  - How interconnected is the Canadian financial system?
  - What are the size and number of vulnerabilities<sup>1</sup> based on transmission mechanisms?
  - What is the extent and type of external exposures within the players?
  - ...

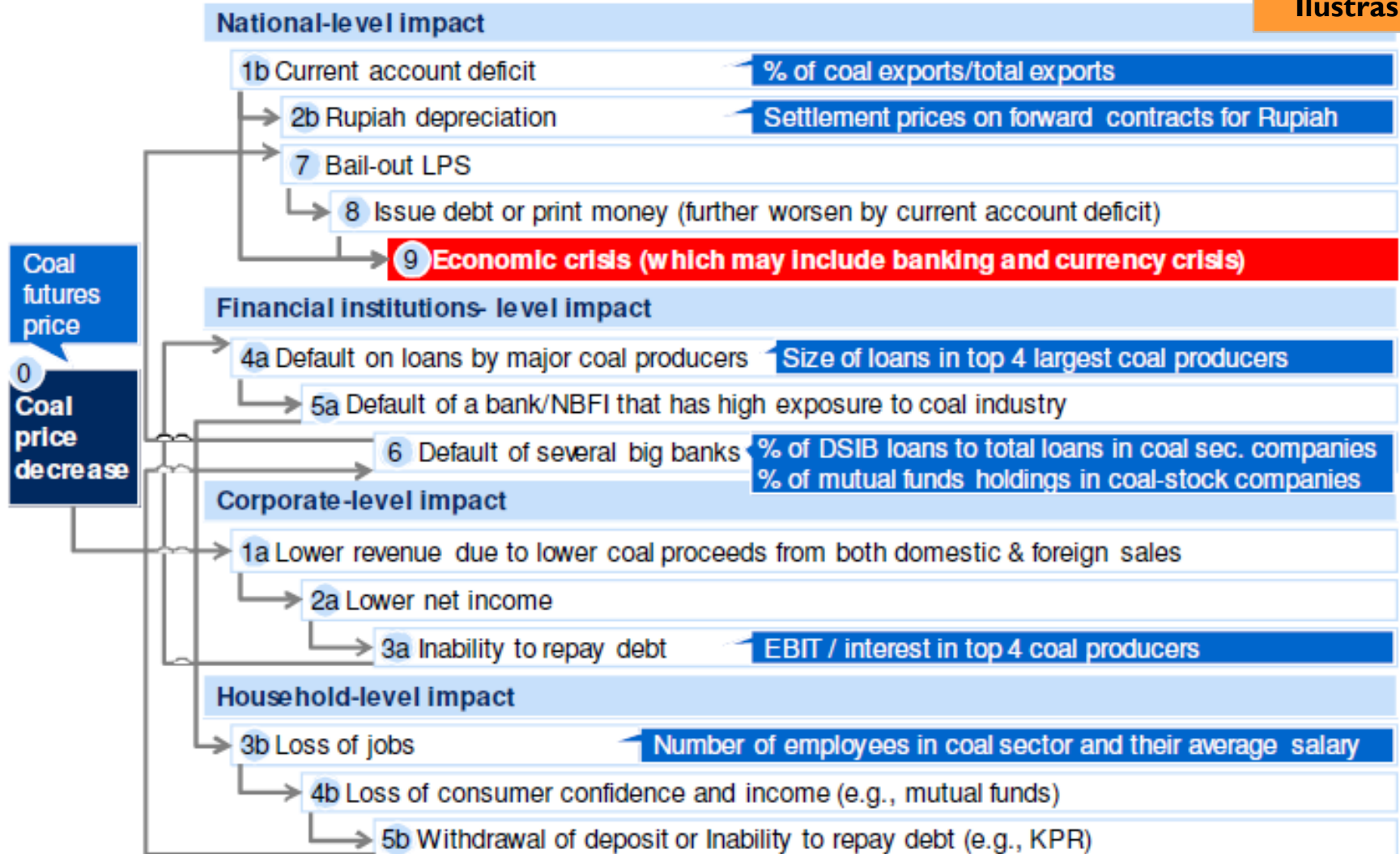
### Probability of shock

- Measured by answering several questions such as:
  - How likely are the transmission flow and actual loss to happen in the future? (e.g., Low, med, high)
  - In once out of many years have this risk unfolds in the system?
  - How is the adequacy of the financial institution to “weather” the effects?
  - ...

# INDIKATOR UNTUK PEMANTAUAN VULNERABILITY

*“Indikator diperlukan untuk dapat memonitor vulnerability yang diidentifikasi dalam proses mapping transmisi risiko”*

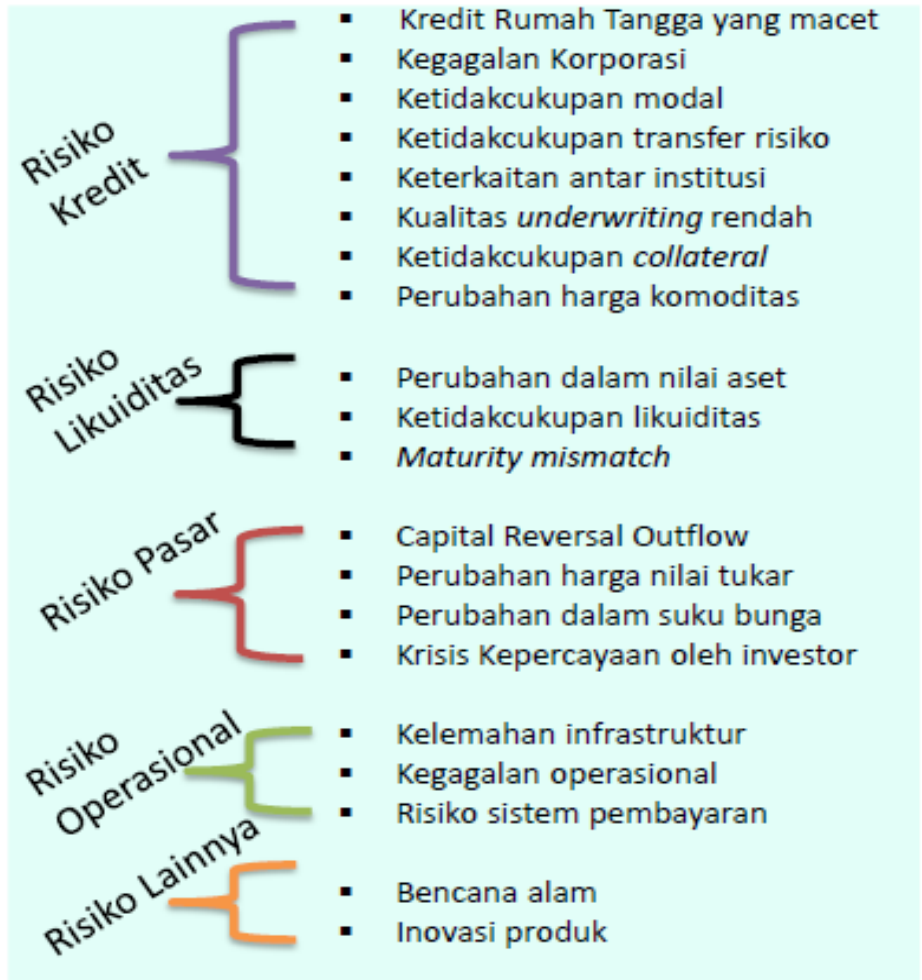
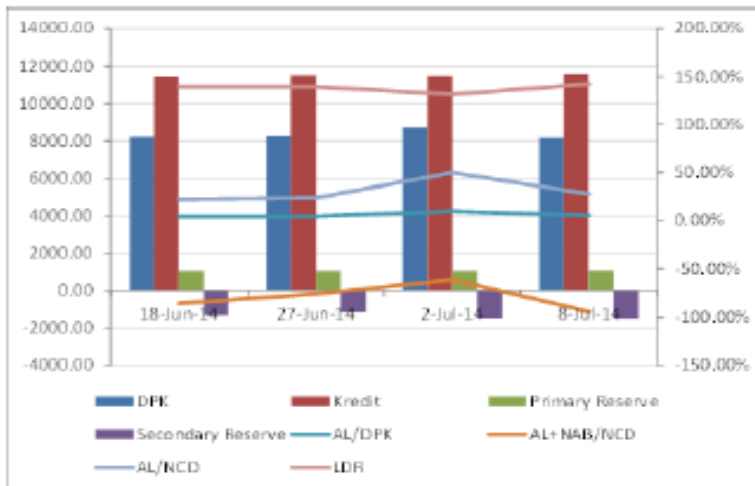
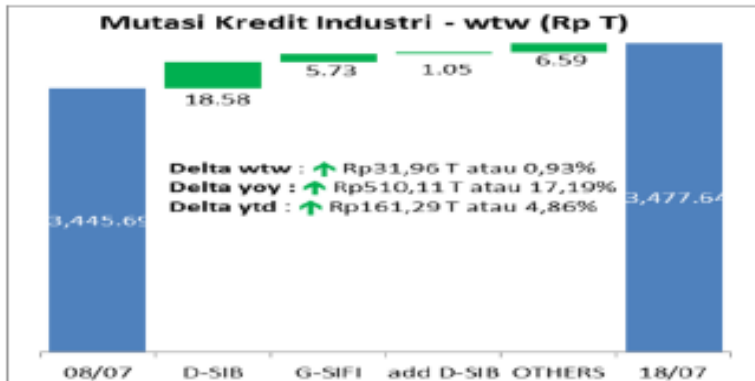
Ilustrasi



Indikator untuk Dimonitor

# ANALISIS RISIKO SISTEMIK INDIVIDUAL LK DAN PROSES AGREGASI

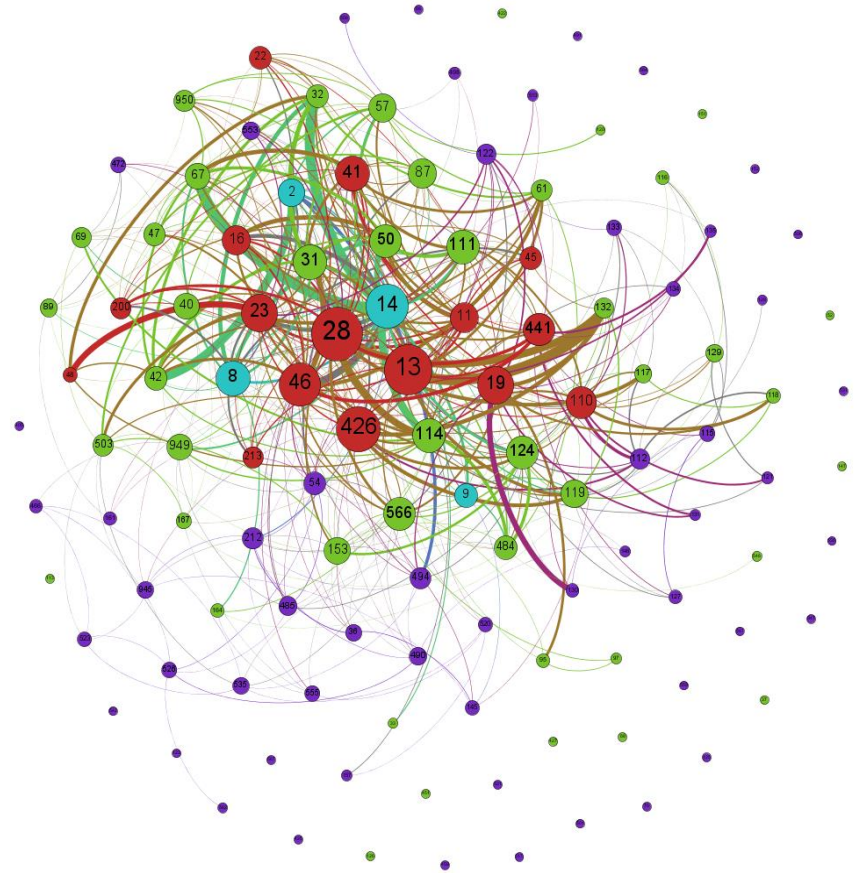
## Analisa industri (Agregasi)



**Financial Balance / Imbalance ??**

# ANALISIS INTERCONNECTEDNESS

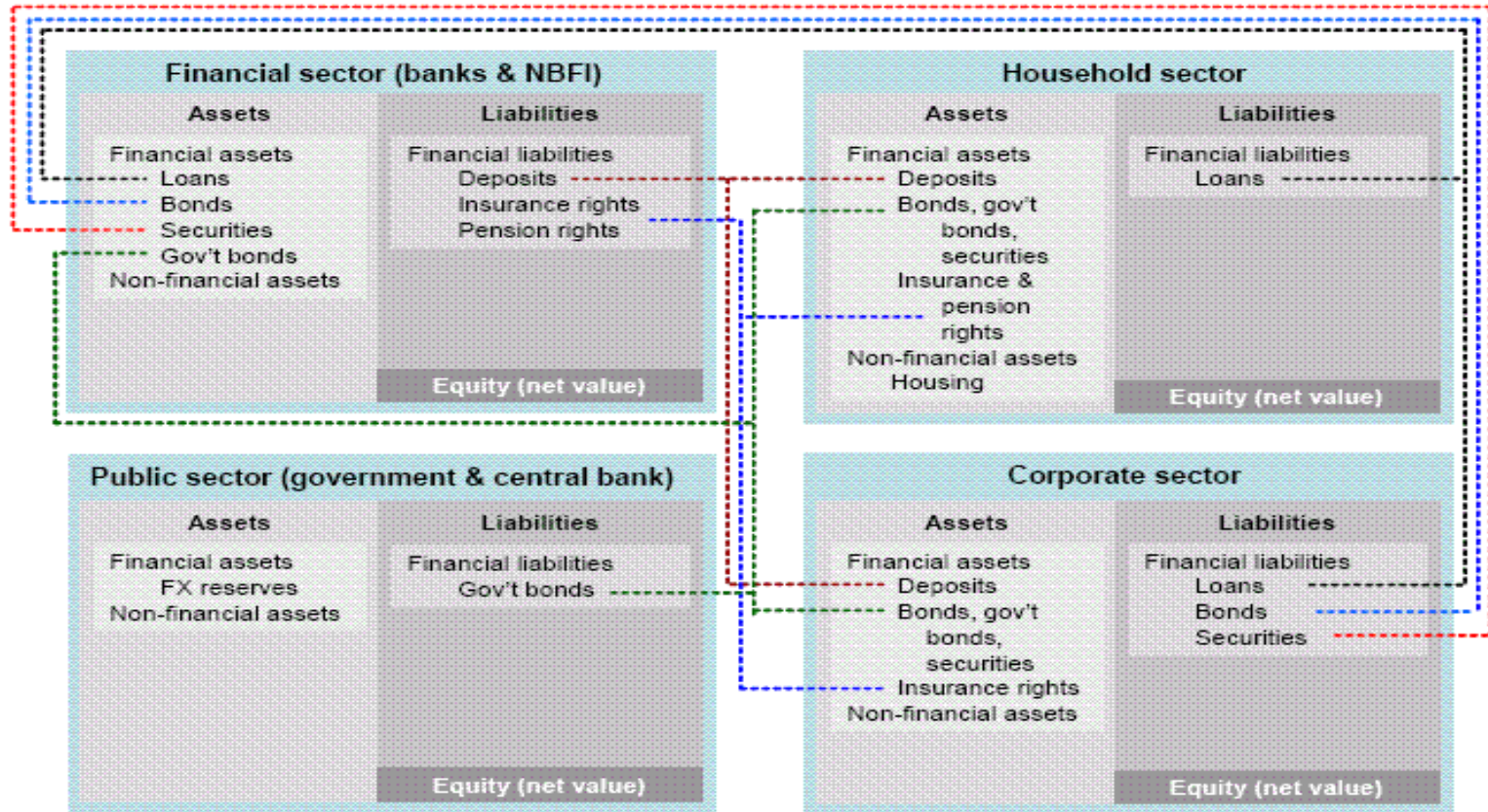
- Analisis *Interconnectedness* dilakukan untuk melihat besarnya peran individu keuangan dalam transaksi di sistem keuangan.
- Fokus diarahkan untuk menilai peran sentral yang dimiliki setiap individu keuangan.
- Saat ini dilakukan untuk transaksi PUAB secara mingguan.





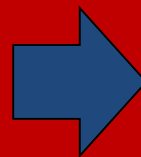
# NERACA KORPORASI DAN RT

*“Perlu Survei untuk memperoleh data Neraca Korporasi & RT”*



Financial Imbalance, jika  $L > A$  ...

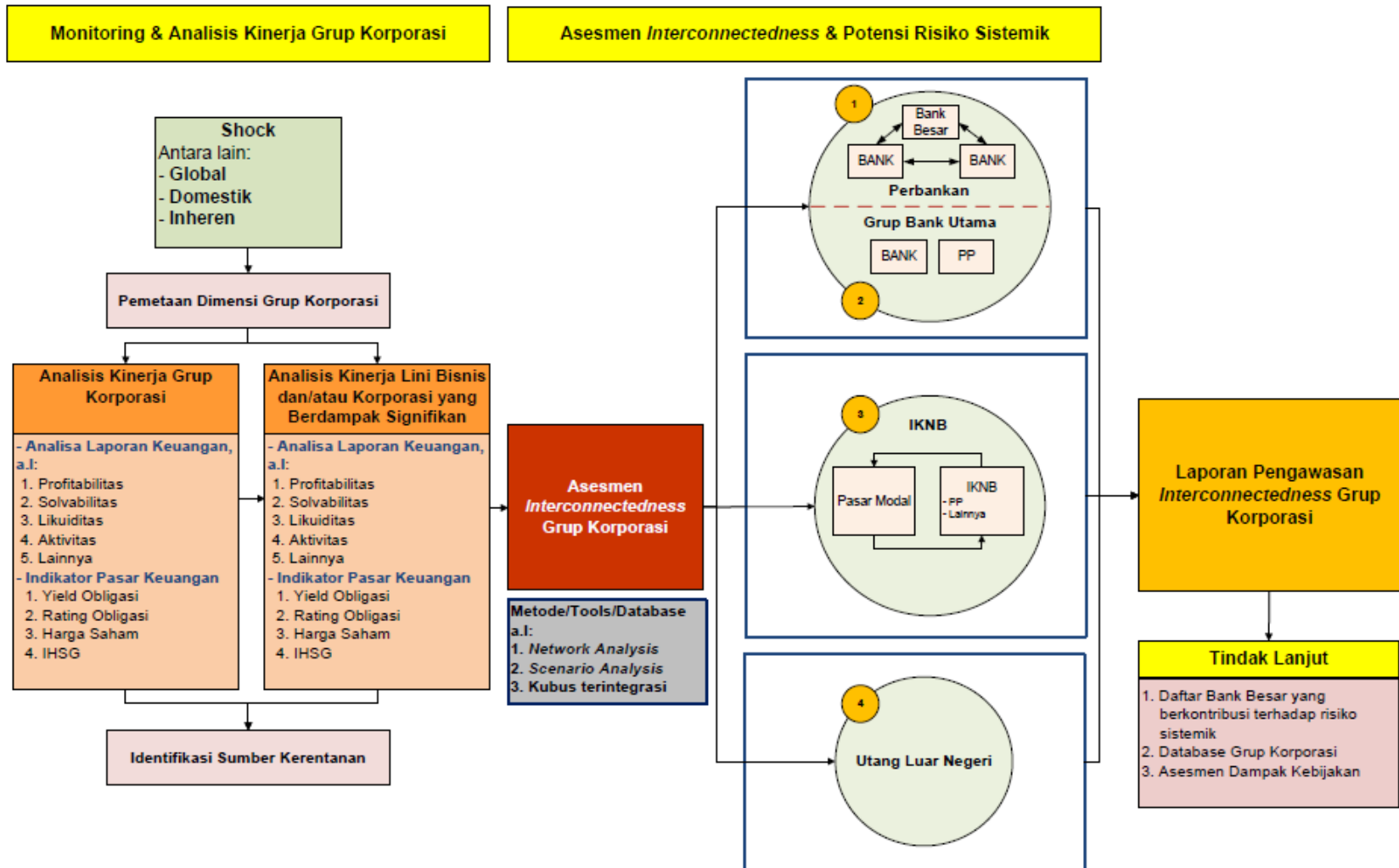
- Debt Service Ratio (DSR/DIR)
- Rasio Liabilities/Assets



Berpengaruh pada keseimbangan Sektor keuangan dan sektor publik (BI dan pemerintah)

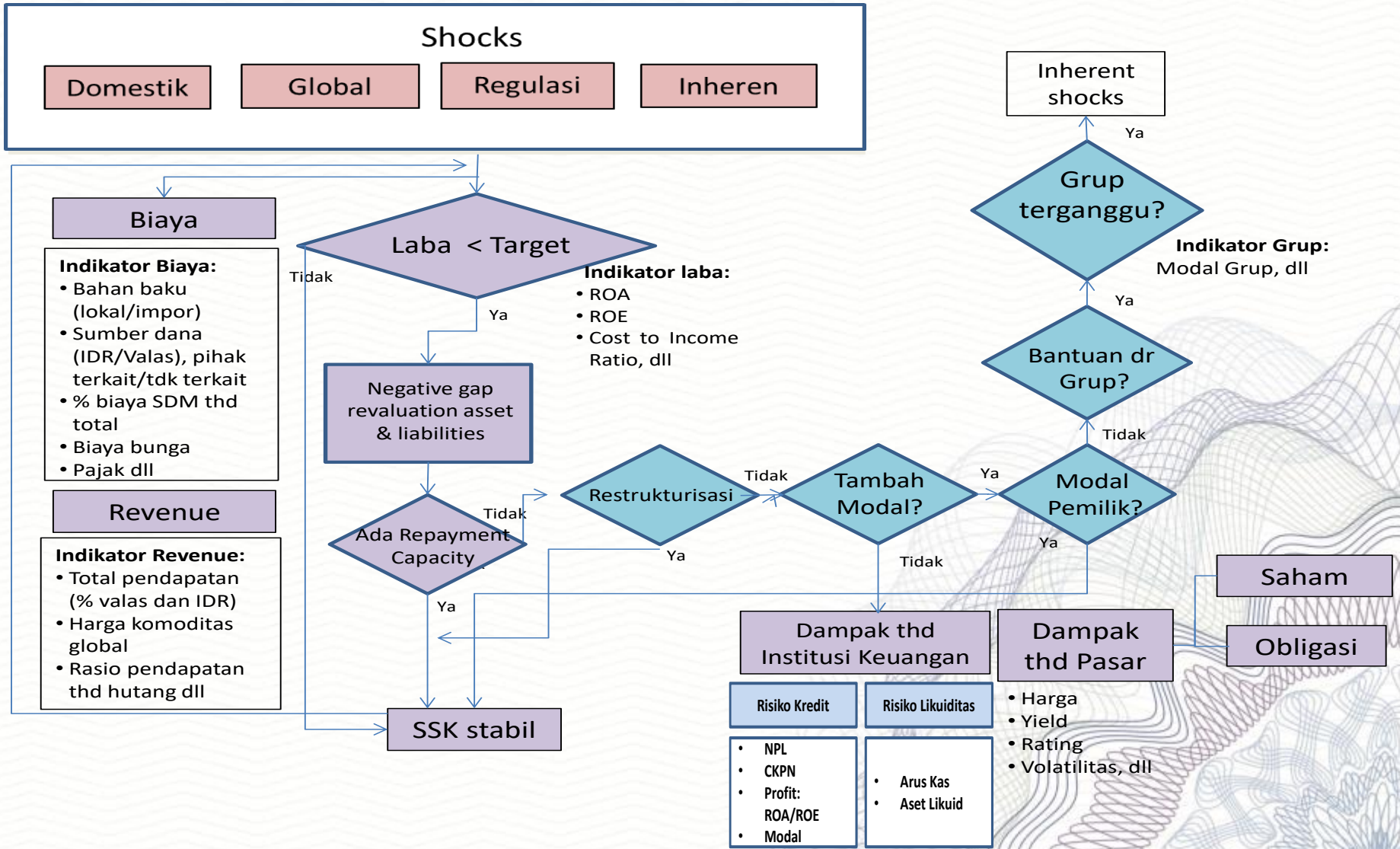
# ANALISIS GRUP KORPORASI (1)

## “Grup Korporasi dan Interconnectedness dengan Sistem Keuangan”



# ANALISIS GRUP KORPORASI (2)

*“Diperlukan pemahaman komprehensif mengenai Mekanisme Transmisi dalam Grup Korporasi”*



# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. SURVEILANS : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. **SURVEILANS : ASSESSMENT TOOLS**
    - **Stress Test**
    - **Banking Industry Rating & Risk Register**
    - **Risk Register**
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER

# SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA

- Rekomendasi penyempurnaan kebijakan pada Satker terkait Makroprudensial, Moneter (termasuk Pasar Keuangan) dan Sistem Pembayaran
- Rekomendasi penguatan pengawasan
- Koordinasi dengan institusi/otoritas lain
- Pembinaan : Rekomendasi kepada Bank, Pengenaan Sanksi.

## EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 3

- ### PEMERIKSAAN 2
- **TEMATIK** (Makroprudensial, Moneter, dan SP)
  - **KEPATUHAN - Targeted**

**LAPORAN SURVEILANS SISTEM KEUANGAN**  
 Laporan Reguler/Periodik  
 Laporan Insidental/Tematik  
 Banking Industry Rating  
 Risk Register  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

## SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA

### 1 SURVEILANS

Monitoring

Identifikasi

Asesmen

- #### Asesmen Risiko Sistemik :
- Granular Stress Test
  - Banking Industry Rating & Risk Register
  - Network Analysis

Asesmen Risiko Lain :  
 Risk Matrix

Asesmen Tematik Lain & Kepatuhan

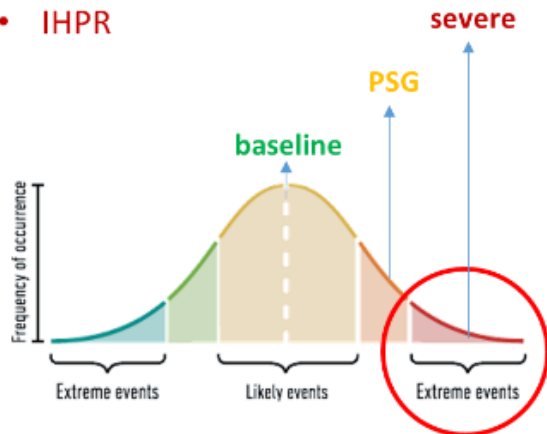
|  |   |
|--|---|
| <b>Siklus Keuangan &amp; Makroekonomi</b>  |   |
| - Global<br>- Domestik   | Kebijakan Moneter, Makroekonomi (GDP, Fiskal, BoP), Perkembangan Pembiayaan, ULN.   |
| <b>Lembaga Keuangan</b>  |   |
| - Bank Besar<br>- IKNB   | Size, Interconnectedness<br>Complexity, Aspek Compliance  |
| <b>Pasar Keuangan dan Infrastruktur</b>  |   |
| - Pasar Uang<br>- Pasar Modal dan Ekuitas<br>- Pasar Valas<br>- Pialang Pasar Uang (PPU) | Liquidity, Maturity, Currency mismatch, Aspek Compliance, Ops Risk  |
| <b>Entitas Non Keuangan</b>  |   |
| - Korporasi<br>- Rumah Tangga  | Asset & Liabilities (Leverage), Likuiditas, Asset Turn Over, DER<br><br>Indeks Keyakinan Konsumen, DIR                          |
| <b>Penyelenggaraan Sistem Pembayaran</b>   |   |
| - Entitas Penyelenggara<br>- Sistem dan Pendukung  | Risiko Peserta RTGS-SKNBI dan PJSP: Likuiditas, Settlement, Interconnectedness, Operasional, aspek compliance, Persetujuan PJSP |

| RISIKO SISTEMIK   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Sumber Risiko Sistemik Dan Transmisi Risiko Sistemik</b>                           | <b>Kerentanan</b>  |  |
| Sumber Risiko dari Informasi EWI dan analisis sumber risiko prioritas                 | - Financial Imbalances<br>Procyclicality)  |  |
| Sumber Risiko Lainnya, termasuk sumber risiko di bidang moneter & SP                  | - Common Exposure  |  |
| Transmisi Risiko : Lembaga Keuangan, Sektor Riil, Pasar, Sistem Pembayaran            | - Interconnectedness & Contagion effect dari idiosyncratic risk                      |  |
| <b>RISIKO DI BID. MON</b>   | <b>RISIKO DI BID SP</b>  | <b>KEPATUHAN</b>                           |
| Risiko Moneter dari Interaksi Pelaku Sistem Keuangan                                  | <b>Prinsip Kehati-hatian Penyelenggara Jasa SP</b>                                   | Keteluhan Makroprudensial, Moneter, dan SP |
| Aktivitas pasar uang dan pasar valas<br>Transaksi treasury bank<br>Lembaga pendukung. | Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran<br><br>Instrumen dan Produk Sistem Pembayaran |  |

# KERANGKA BERPIKIR *GRANULAR STRESS TEST* SEBAGAI BAGIAN DARI KERANGKA MAKROPRUDENSIAL

## *Macro Shocks*, contoh:

- PDB
- Suku bunga
- Nilai Tukar
- Inflasi
- IHPR



\*) PSG: *Prolonged Slow Growth*



Spill over effect terhadap ekonomi domestik dan institusi keuangan (termasuk perbankan)

*On the pipeline di tahun 2017*



**Industri Perbankan**  
(*Proxy Bank Berpotensi Sistemik*)

**Aktivitas Bisnis**  
*Bank Specific Risk*



- **Credit Risk**
- **Market Risk**

**Profitabilitas / Modal**

**CAR**

**Solvency Stress Test**

**Liquidity Risk**

**Liquidity Stress Test**



**Agregasi Hasil**  
**Stress Test**



Identifikasi *common exposures, interconnectedness, & contagion*

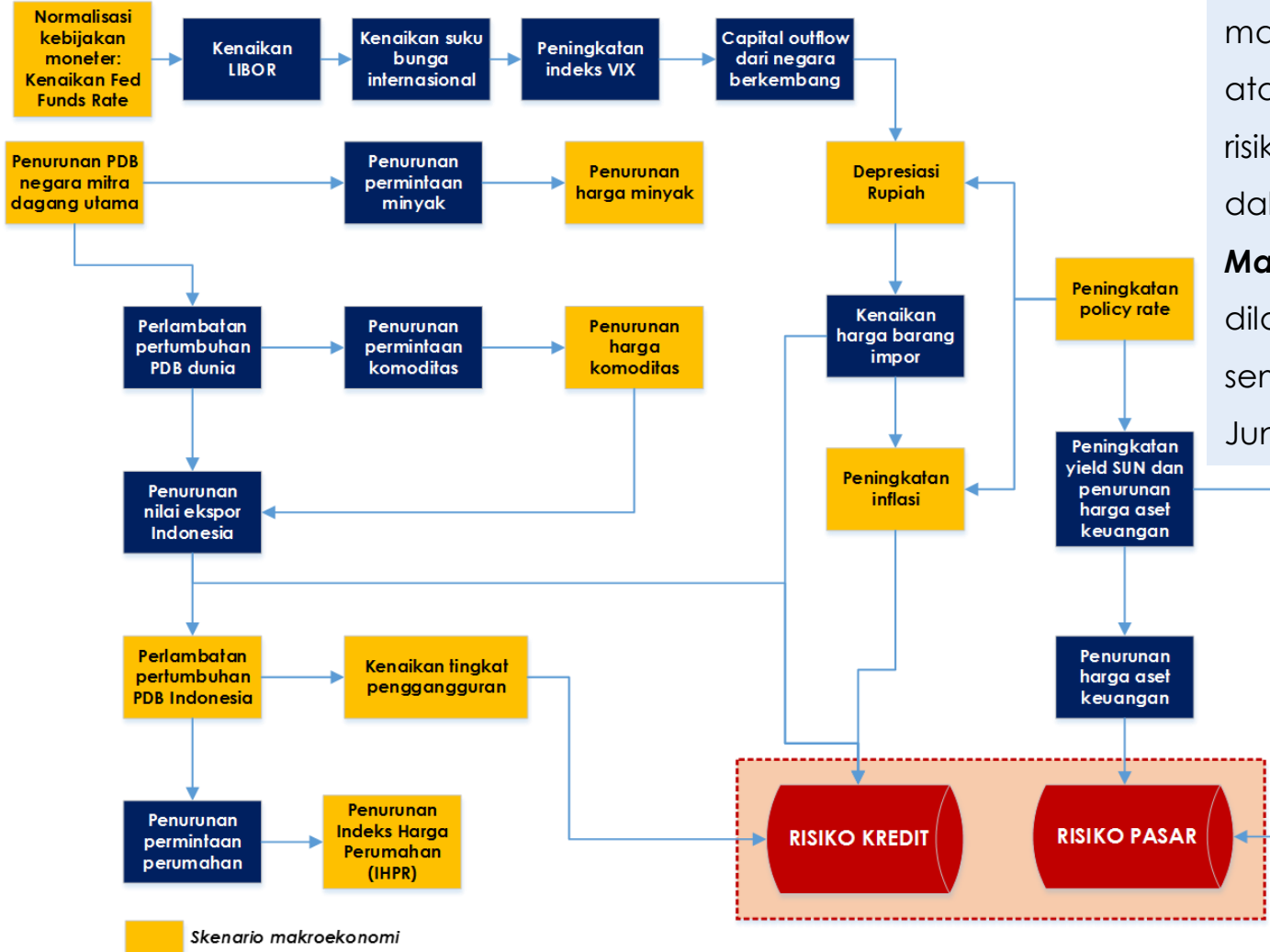
**Liquidity Risk**

sistem keuangan

termasuk analisis *contagion*

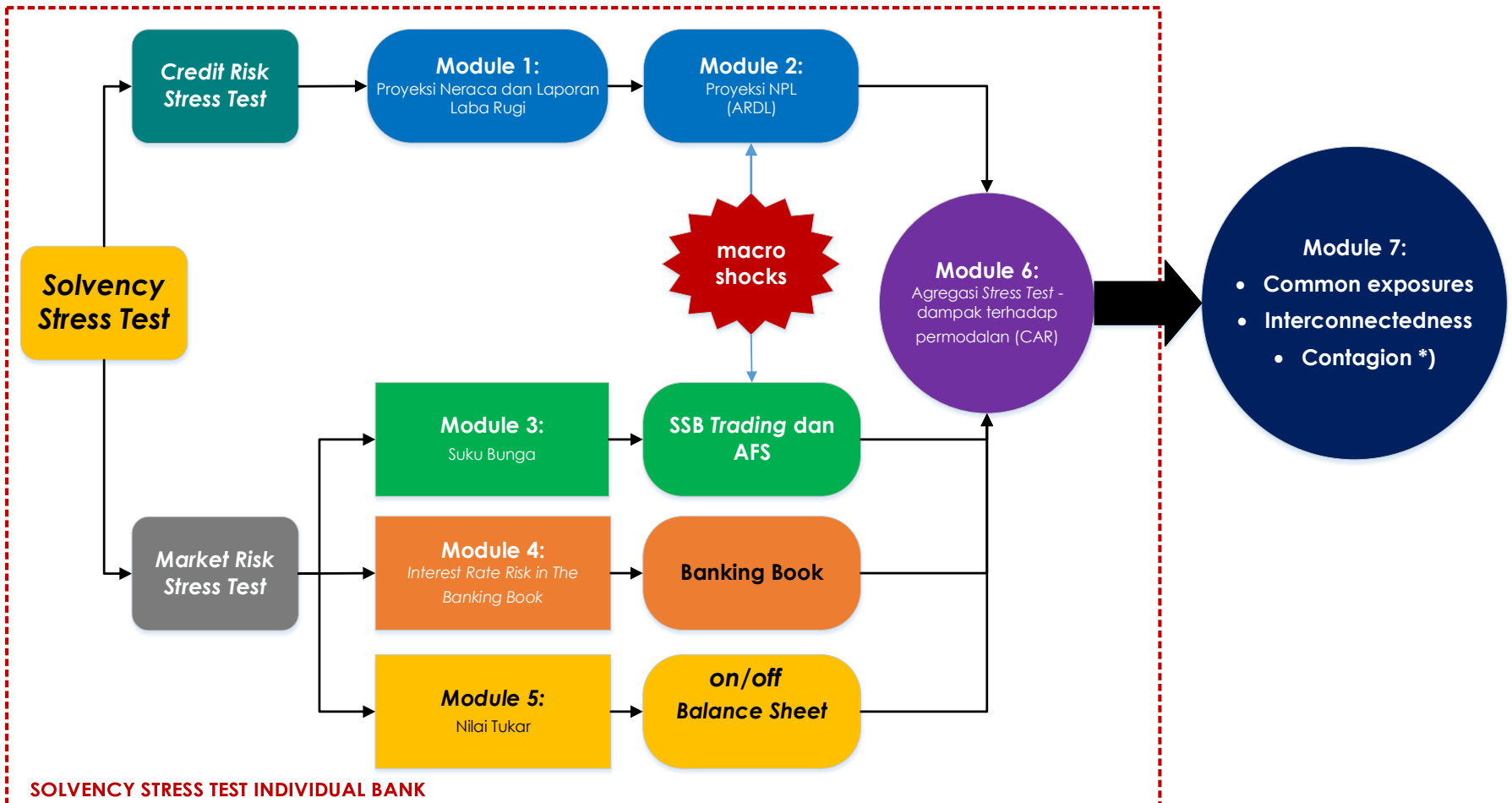


# TRANSMISI SKENARIO MAKROEKONOMI



Transmisi seluruh skenario makroekonomi didasarkan atas penetapan sumber risiko prioritas oleh DKMP dalam **Risk Assessment Matrix (RAM)** yang dilakukan secara semesteran untuk posisi Juni dan Desember

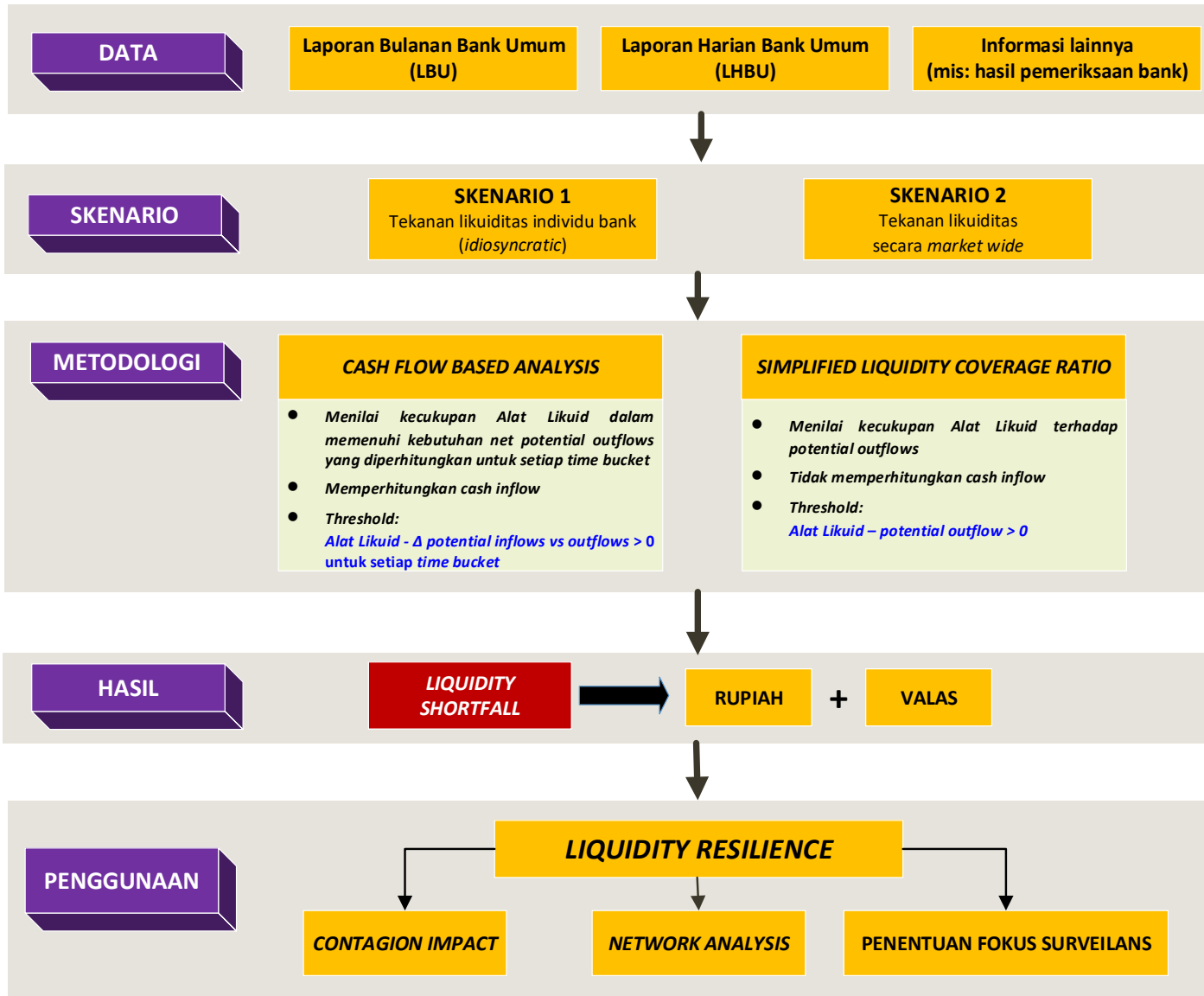
# Metodologi Solvency Stress Test



\*) jika terdapat bank dengan CAR di bawah CAR Profil Risiko



# Kerangka berpikir *liquidity stress test*



# Cakupan *Liquidity Stress Test*

*Liquidity Stress Test* memperhitungkan *funding liquidity risk* & *market liquidity risk*



## FUNDING LIQUIDITY RISK

**Definisi:** Risiko saat bank tidak dapat memenuhi kebutuhan arus kas jika terjadi **penarikan dana**, **peningkatan kewajiban kontinjensi** dan tekanan (*shock*) pada *cash inflow*.

Dalam pengelolaan bank terhadap *funding liquidity risk*, bank memantau alat likuid yang jatuh tempo dibandingkan dengan *gap* antara *cash outflow* & *cash inflow*.

Tercermin dari penggunaan asumsi a.l. *run off rates* DPK, *roll off rates* dari pinjaman interbank



## MARKET LIQUIDITY RISK

**Definisi:** Risiko saat bank tidak dapat membeli atau menjual surat berharga pada harga pasar yang *favorable* dengan **dampak penurunan harga yang terbatas**.

*Market liquidity risk* tercermin dari **volume (turnover ratio)** dan **price-based measures (bid-ask spread, price impact of large trades)**.

Tercermin dari penggunaan asumsi **haircut** dari Alat Likuid.

*Sumber: IMF Working Paper. Macroprudential Liquidity Stress Testing in FSAPs for Systemically Important Financial Systems. May 2017.*

# Metodologi *liquidity stress test*

## **CASH FLOW BASED ANALYSIS**

- Tujuan: menilai ketahanan likuiditas bank untuk memenuhi kebutuhan *net cash outflow* secara periodik
- Menggunakan *time bucket*
- Pendekatan ***cash flow mismatch***
- Bersifat ***cumulative*** berdasarkan data jatuh tempo untuk setiap *time bucket*
- **Memperhitungkan *cash inflow***
- **Risk horizon:** 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan

## **SIMPLIFIED LIQUIDITY COVERAGE RATIO**

- Tujuan: menilai ketahanan likuiditas bank untuk memenuhi kebutuhan *cash outflow* sampai dengan 30 hari ke depan
- Tidak menggunakan *time bucket*
- Pendekatan ***ratio / threshold – based***
- Bersifat ***non cumulative*** berdasarkan data *stock (outstanding)*
- **Tidak memperhitungkan *cash inflow*** Risk horizon: 30 hari

*Pengembangan metodologi liquidity stress test mengadopsi pendekatan IMF dalam Financial Sector Assessment Program 2017*

# LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGUNAAN BANKIR

- Untuk melakukan pengawasan makroprudensial dalam satu siklus utuh, diperlukan **tools asesmen** mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan sebagai titik tolak rencana pengawasan (*supervisory action*) berikutnya.
- BankIR mengidentifikasi dan menilai **risiko** dan **vulnerability** yang terjadi dalam sistem keuangan serta memisahkan risiko dari **sumber risiko** yang menyebabkan timbulnya risiko tersebut. Sumber risiko dalam persepsi manajemen risiko perbankan digolongkan sebagai *risk driver*.
- BankIR **bukan** merupakan *early warning indicator* (EWI) dan tidak ditujukan untuk mengindikasikan terjadinya **krisis**. Identifikasi atas timbulnya risiko sistemik merupakan bagian dari pilar BankIR (pilar Resiliensi dan Balance), sementara pilar Efisiensi mencakup ketidakseimbangan sistem keuangan dalam jangka panjang.
- Hasil analisis BankIR akan dituangkan secara detil pada **Risk Register**, yang berisi list dan uraian risiko maupun *vulnerability* yang perlu menjadi fokus pengawasan makroprudensial periode berikutnya.

# PILAR-PILAR DALAM BANKIR

Banking Industry Rating (BankIR) mencakup tiga pilar penilaian yaitu **Resilience**, **Balance** dan **Efficiency**. Ketiga pilar ini dipilih sesuai dengan kerangka kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yaitu untuk membatasi dan mencegah risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam rangka mendukung terpeliharanya SSK.



- Mengukur tingkat **ketahanan permodalan** dan **likuiditas** industri perbankan dalam menyerap risiko. Pilar ini mengidentifikasi risiko sistemik dari **idiosyncratic risk** maupun **common risk factor** yang terdapat dalam industri perbankan.
- Aspek **contagion** dari **idiosyncratic risk** akan diperhitungkan dalam metode penilaian masing-masing parameter dengan menggunakan D-SIB score yang telah mencakup faktor **interconnectedness**.

Pilar ini menilai kondisi **vulnerability** dari **intermediasi perbankan** ygng dapat mendorong peningkatan risiko sistemik, baik pertumbuhan yg **excessive (procyclicality)**, atau cenderung **terkonsentrasi (common exposure)** pd sektor tertentu.

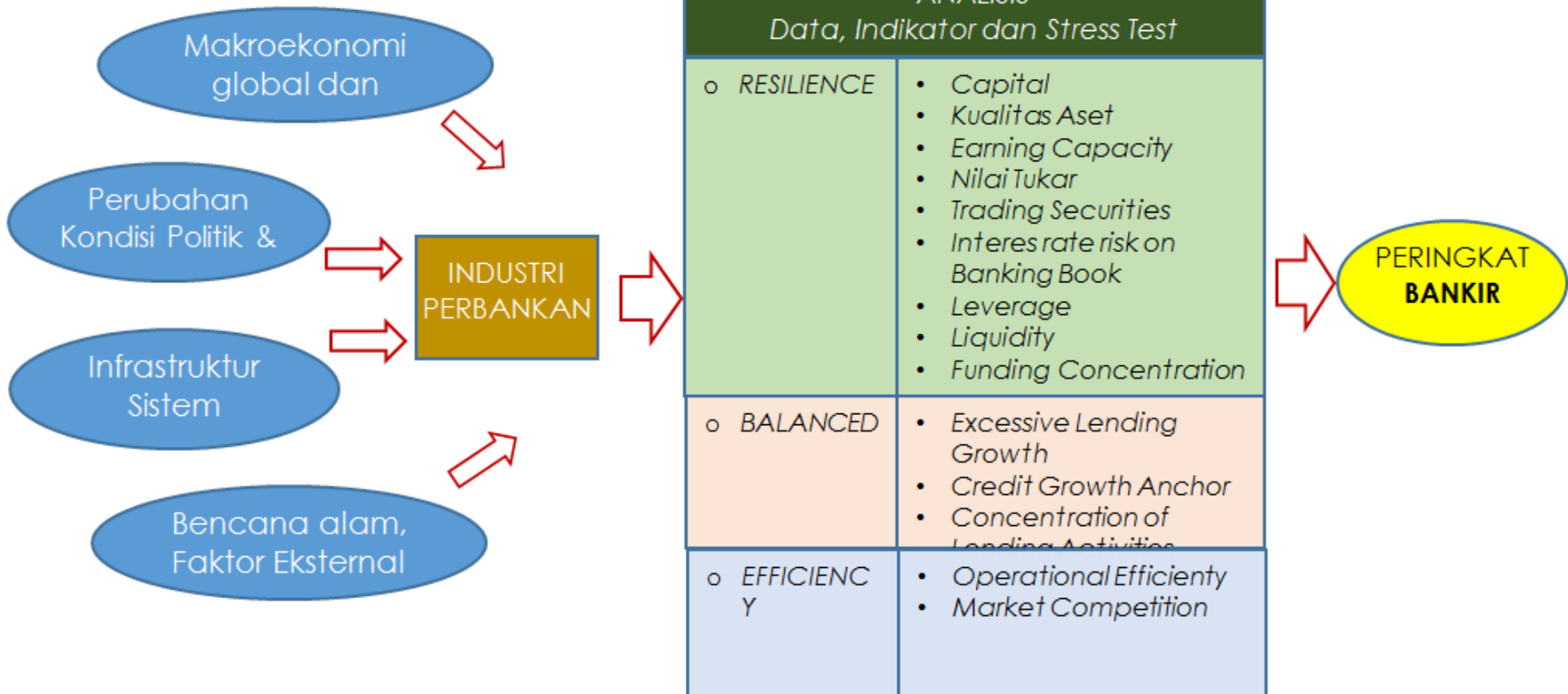
Untuk menciptakan SSK yang berkelanjutan, aspek efisiensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pilar ini mencakup penilaian atas **efisiensi operasional**, **efisiensi terkait beban terhadap ekonomi**, dan tingkat **konsentrasi persaingan usaha** industri perbankan.

# FRAMEWORK BANKING INDUSTRY RATING

*Industry Environment*

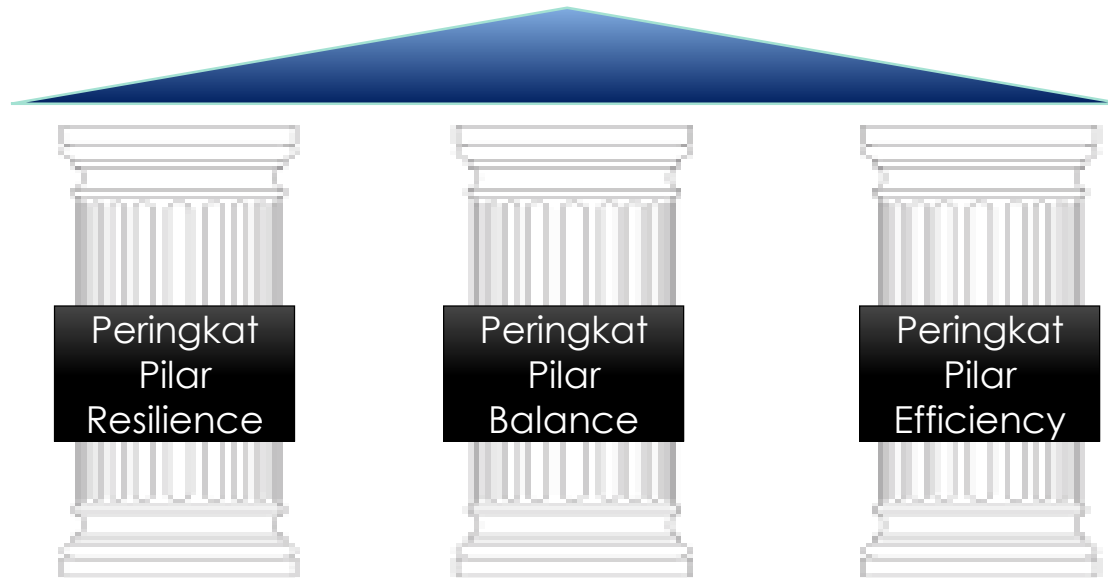
*Analisis Risiko Keuangan*

*Stabilitas Industri Perbankan*



# METODOLOGI BANKIR

## Peringkat Komposit



### Peringkat Parameter

- Capital
- Asset Quality
- Earning Capacity
- Liquidity
- Forex Exposure
- Price Risk
- Funding Concentration
- Market Liquidity
- Leverage
- IRRBB

### Peringkat Parameter

- Excessive Lending Growth
- Credit Growth
- Credit Concentration

### Peringkat Parameter

- Operational Efficiency
- Economic Efficiency
- Market Competition

*Industry Wide*

*Bank Berpotensi Sistemik*

## PENETAPAN INDIKATOR BANKIR

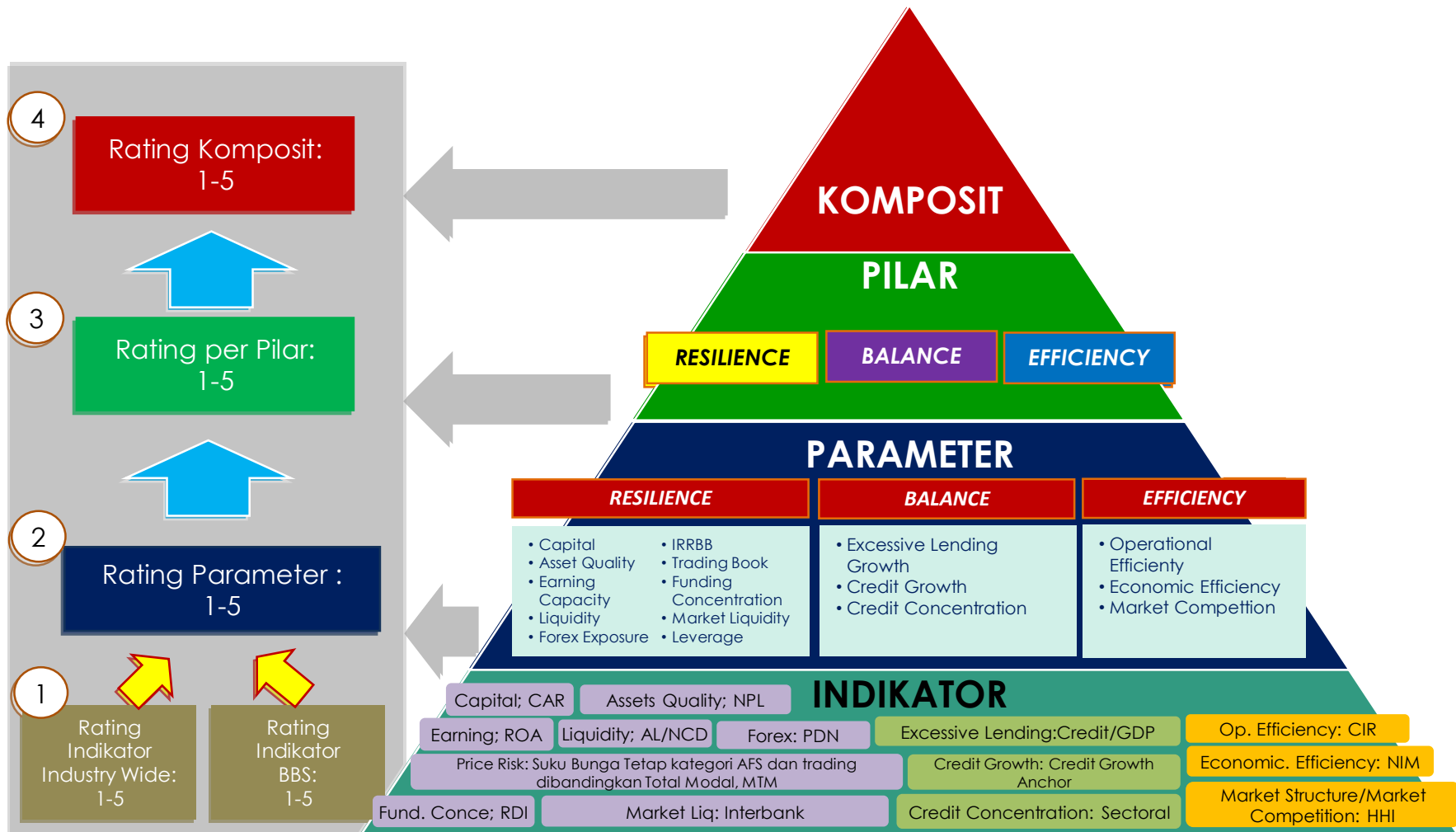
Untuk setiap Parameter ditetapkan indikator utama (*leading indicator*) dan indikator pelengkap (*conforming indicator*) untuk mengukur risiko dalam industri perbankan.

Penetapan Indikator BANKIR dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sbb:

| Kriteria                              | Penjelasan   |
|---------------------------------------|--|
| <b>Capturing objective</b>            | Menggambarkan adanya kecenderungan <i>excessive growth</i> , <i>external spillover</i> , perubahan <i>risk taking behavior</i> dan <i>contagion of idiosyncratic risk</i> khususnya dari D-SIB pada sistem keuangan. |
| <b>Relevance</b>                      | Mampu meng-capture perkembangan terkini pada sistem keuangan ( <i>state- contingent</i> ) dan mampu mengukur kerentanan atau event yang kemungkinan besar terjadi dan berdampak signifikan terhadap sistem keuangan. |
| <b>Forward looking</b>                | Mencakup analisis risiko di masa mendatang, termasuk prosiklikalitas dan perubahan <i>risk taking behavior</i> .   |
| <b>Collectable/<br/>Constructable</b> | Data dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkesinambungan.  |
| <b>Risk sensitivity</b>               | Peka terhadap perkembangan risiko dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik.  |



# METODOLOGI PENILAIAN - EMPAT LEVEL PEMERINGKATAN -



Proses penilaian/asesmen dilengkapi dengan professional judgment sehingga penilaian tidak bersifat mekanistik. Penggunaan indikator dan stress test merupakan referensi bagi pelaksanaan *judgment*.

## RISK REGISTER

---

*Risk Register* merupakan tahapan yang dilakukan setelah peringkat komposit (BankIR) ditetapkan

Risk register mencakup identifikasi risiko utama yang memerlukan perhatian, rekomendasi tindak lanjut, target penyelesaian dan monitoring progress tindak lanjut.

Merupakan *supervisory plan* dalam kerangka pengawasan makroprudensial

Digunakan untuk memonitor risiko-risiko utama yang timbul dari kegiatan usaha sebagian besar bank (D-SIBs) atau yang memiliki potensi risiko sistemik terhadap industri.

*Risk register* ditujukan untuk menilai risiko dengan horizon waktu pendek dan menengah

## RISK REGISTER (2)

| Industry Risk   | Penilaian  | Respon dan/atau Progress  | Rekomendasi Tindak Lanjut  |
|---|--|---|--|
| <p><b>Risiko Kredit</b> dari peningkatan ULN Korporasi</p> <p>Target Institusi: Seluruh D-SIB</p> | <p><b>Risk Rating: HIGH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ULN Swasta meningkat dari USD104.3 juta (Jan 2013) menjadi USD 117,4 juta (Jan 2014) atau meningkat proporsinya dari 82,8% menjadi 83,05%.</li> <li>- Berdasarkan analisis DKMP: Mayoritas perusahaan dengan ULN tertinggi masih belum melakukan <i>hedging</i> (67,7%).</li> <li>- Tahun 2012, Debt to Ebitda mayoritas (95,9%) korporasi penerima ULN &gt;5 (thn 2011: mayoritas 56,6% &lt;5).</li> <li>- Kondisi di atas dapat berdampak pada perbankan domestik apabila korporasi juga merupakan debitur bank.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan terhadap pinjaman ULN Swasta non-keuangan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan analisis terhadap proporsi dan kemampuan membayar korporasi peminjam ULN yang juga menjadi debitur perbankan domestik.</li> </ul> |
| <p><b>Risiko Likuiditas</b></p> <p>Target Institusi: Seluruh D-SIB</p>                            | <p><b>Risk Rating: MEDIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Kredit yang cukup tinggi (LDR beberapa D-SIB cukup tinggi menyebabkan adanya kompetisi penghimpunan DPK</li> <li>- Potensi <i>Capital Reversal Outflow</i> karena peningkatan Fed Rate dapat menyebabkan tekanan likuiditas domestik</li> <li>- Penerapan regulasi GWM baru direspon dengan peningkatan DPK oleh bbrp bank shg meningkatkan kompetisi penghimpunan DPK</li> <li>- Seluruh D-SIB masih memiliki rasio AL/NCD yang memadai (&gt; 50%)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan terhadap kondisi likuiditas perbankan</li> <li>- Mengintensifkan <i>stress test</i> likuiditas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pengawas OJK atas kondisi likuiditas beberapa bank yang menjadi perhatian</li> </ul>                                      |

## RISK REGISTER (3)

| Industry Risk  | Penilaian   | Respon dan/atauProgress  | Rekomendasi Tindak Lanjut  |
|--|---|--|--|
| <p><b>Risiko Kredit</b> dari penurunan GDP</p>   | <p><b>Risk Rating:</b> MEDIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan proyeksi GDP menjadi 5,1%-5,5% atau menurun dari pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,78%. Penurunan GDP diperkirakan akan turut mempengaruhi pendapat per kapita serta kemampuan membayar debitur.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring perkembangan NPL perbankan domestik</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap <i>underwriting standard</i> yang dilakukan bank untuk memastikan tidak terdapat penurunan kualitas <i>underwriting</i> demi mencapai target pertumbuhan kredit</li> </ul> |
| <p><b>Risiko Nilai Tukar</b> dari peningkatan porsi ULN perbankan</p> <p>Target Institusi: Seluruh D-SIB</p> | <p><b>Risk Rating:</b> LOW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat peningkatan ULN perbankan dari USD 21.6 juta (Jan 2013) menjadi USD 23.9 juta (Jan 2014) meskipun secara proporsi terhadap total ULN Swasta menurun dari 17.21% menjadi 16.9%.</li> <li>- D-SIB seluruhnya melakukan <i>hedging</i> atas ULN tercermin dari rasio PDN yang cukup rendah, antara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>stress test</i> nilai tukar terhadap ketahanan CAR D-SIB.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan analisis lebih lanjut atas peruntukan ULN,</li> <li>- Melakukan analisis atas penilaian <i>mismatch</i> nilai tukar dan durasi dari ULN yang diterima bank.</li> </ul>                          |

# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. SURVEILANS : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. SURVEILANS : ASSESSMENT TOOLS
    - Stress Test
    - Banking Industry Rating & Risk Register
    - Risk Register
  - 6. PEMERIKSAAN**
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. PENGAWASAN MONETER
- 

# PEMERIKSAAN MAKROPRUDENSIAL

*“Pemeriksaan Makroprudensial dilakukan secara selektif, bersifat tematik dan dikoordinasikan bersama-sama dengan Otoritas lain (mis : OJK)”*

## OBJEK PEMERIKSAAN



- DSIB dan/atau bank lainnya
- Lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank (apabila diperlukan)

## DIFERENSIASI PEMERIKSAAN OJK



- Fokus pemeriksaan terkait Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- Cakupan pemeriksaan berupa pemeriksaan tematik dan *compliance*

## MEKANISME KOORDINASI



- Koordinasi awal untuk memastikan fokus pemeriksaan belum dilakukan OJK
- BI menyampaikan summary hasil pemeriksaan kepada OJK

# PEMERIKSAAN

---

## Pemeriksaan (*on-site examination*):

Kegiatan pengumpulan data dan informasi, verifikasi, analisis berdasarkan hasil surveilans dan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial dan bank sistemik.

### 1. Tujuan :

Melakukan pengujian dan verifikasi data dan informasi secara *on the spot*, terkait :

- Potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan
- Aspek kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan Bank Indonesia

### 2. Cakupan dan kegiatan:

- a. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan makroprudensial, moneter dan pasar uang, dan sistem pembayaran.
- b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat berupa rekomendasi kebijakan ataupun pengenaan sanksi dalam hal terdapat pelanggaran peraturan makroprudensial

### 3. Proses Utama Pemeriksaan :

- a. Pengumpulan Data
  - Data dan informasi surveilans
  - Data dan informasi laporan Bank dan IKNB
- b. Verifikasi dan analisis
  - Analisis sesuai dengan rencana pemeriksaan yang menjadi prioritas
- c. Laporan hasil pemeriksaan

# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. SURVEILANS : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. SURVEILANS : ASSESSMENT TOOLS
    - Stress Test
    - Banking Industry Rating & Risk Register
    - Risk Register
  6. PEMERIKSAAN
  - 7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN**
  8. PENGAWASAN MONETER
- 



01

Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), dan Kegiatan Layanan Uang (KLU)

02

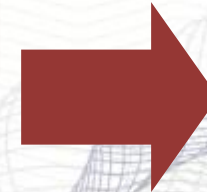
Memastikan penyelenggaraan SP secara **lancar, aman, efisien dan handal** dengan memperhatikan perlindungan konsumen

03


Memastikan penyelenggaraan PUR oleh bank atau pihak lain dilaksanakan secara aman dan akuntabel

04

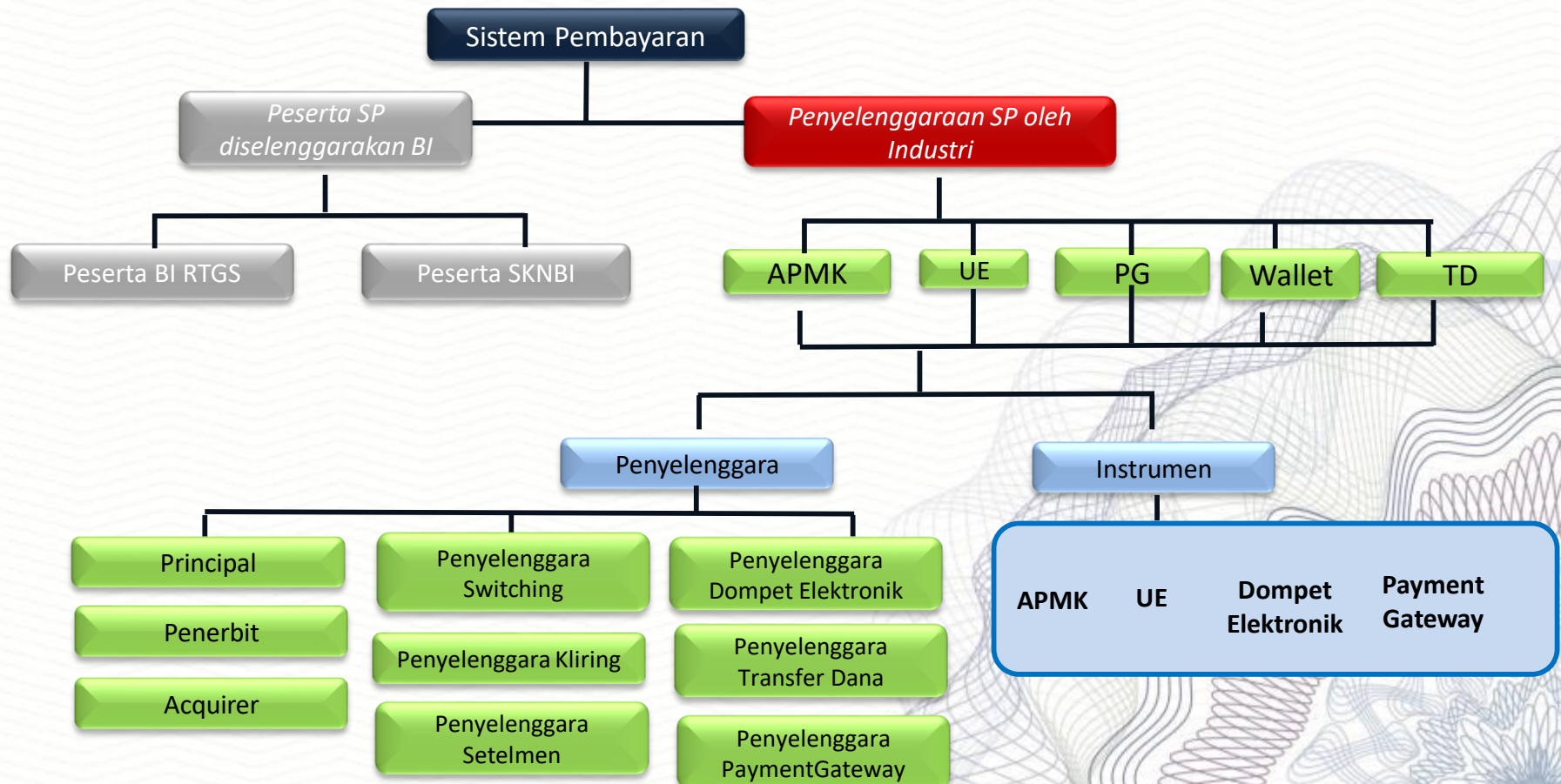
Memastikan KLU dilakukan dengan tata kelola yang baik dan mengacu peraturan perundang-undangan



**DSSK**

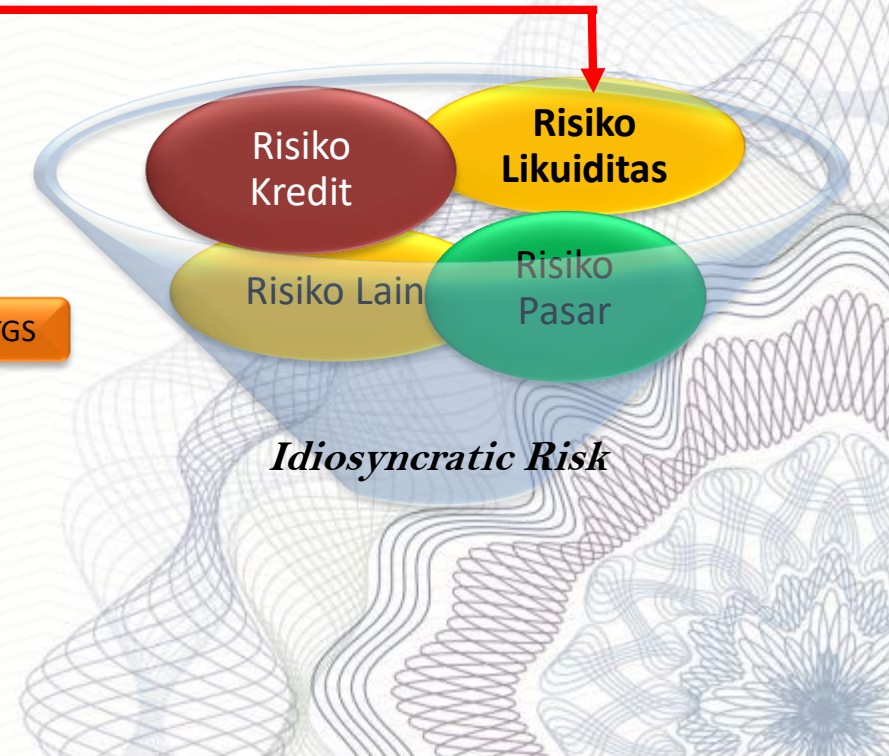
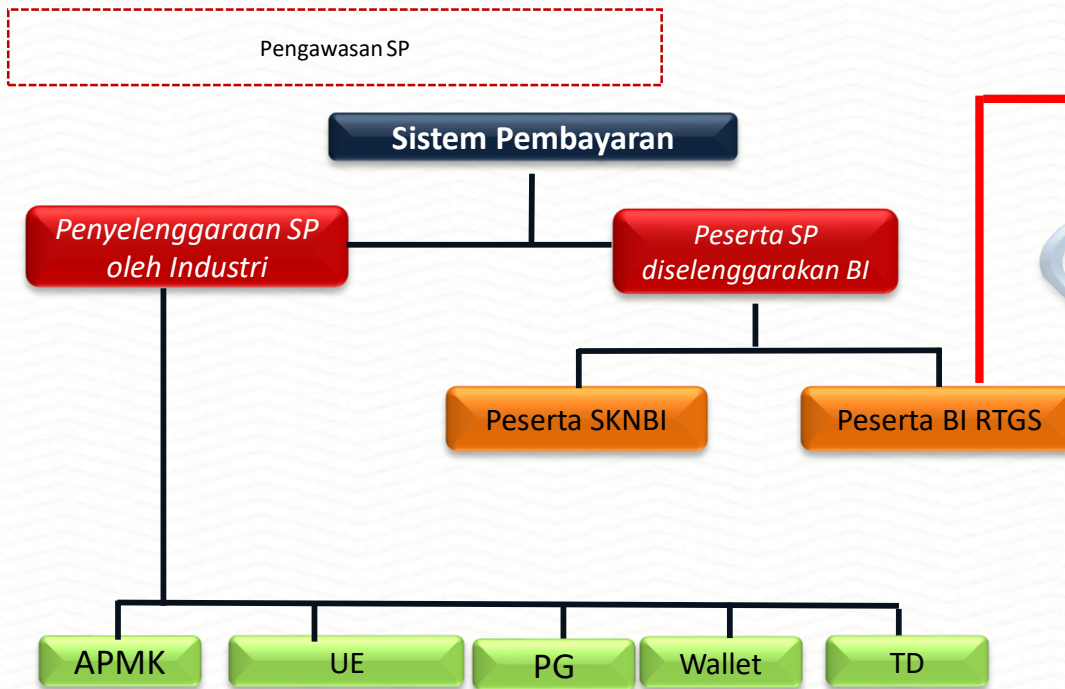
| Obyek Pengawasan                                      | <br>DSSK  | <br>DKSP                       |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia |    | <br>BI-RTGS, SKNBI dan BI-SSSS |
| Kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia          | <br>Kepesertaan pada BI RTGS, SKNBI dan BI SSSS  |                                |
| Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Industri       | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>• APMK (kartu ATM/Kartu Debet/Kartu Kredit)</li> <li>• Uang Elektronik</li> <li>• Dompot Elektronik</li> <li>• Payment Gateway</li> <li>• Proprietary Channel</li> <li>• Penyelenggara Transfer Dana</li> <li>• PJPUR</li> <li>• KLU</li> </ul> |                                |

- Sistem Pembayaran sebagai salah satu infrastruktur dalam sistem keuangan berperan dalam menjaga kelancaran perpindahan aset dan likuiditas setiap pelaku di sistem ekonomi dan keuangan.
- Fokus pengawasan: (i) aspek risiko pada sistem pembayaran yang dapat mempengaruhi SSK (settlement risk), dan (ii) penyelenggaraan sistem pembayaran yang mencakup APMK, Uang Elektronik, Transfer Dana oleh bank, dan Layanan Keuangan Digital (LKD)



## Identifikasi Idiosyncratic Risk dan Risiko di Sistem Pembayaran

Meminimalkan terjadinya risiko sistemik yang difokuskan pada aspek *idiosyncratic risk* bank sistemik dan berpotensi sistemik serta kerentanan yang terjadi di sistem keuangan berikut faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi SSK



PBI No.18/40/PBI/2016 dan SE BI No.18/41/DKSP  
Bank/non bank yang telah berizin:

APMK

Uang Elektronik

Wallet

PG

TD

## Pengawasan *offsite* dan *onsite* terkait kepatuhan penyelenggara SP

Persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah **berizin**

1

Permohonan  
Persetujuan



2

Persetujuan pengembangan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran

Pengembangan fitur, jenis, ayanan atau fasilitas produk dan/atau layanan aktivitas jasa sistem pembayaran yang berizin

- Penyelenggaraan *Payment Gateway* yang dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Acquirer*;
- Penyelenggaraan Dompot Elektronik yang dilakukan oleh:
  - Bank
  - LSB Penerbit Uang Elektronik
- Penyelenggaraan *Proprietary Channel* yang dilakukan oleh Bank.

3

### Persetujuan kerja sama

- Kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain
- Kerja sama dengan penyelenggara penunjang
- Pelaporan *co-branding*

BI dapat memberikan kemudahan kepada PJSP berizin atas proses persetujuan kerja sama, dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen nontunai untuk program terkait kebijakan nasional

# OUTLINE:

---

- 
1. DASAR HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
  2. CAKUPAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
  3. SIKLUS PENGAWASAN BANK INDONESIA
  4. SURVEILANS : ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEUANGAN
    - Monitoring
    - Identifikasi Sumber Risiko
    - Transmisi Risiko
  5. SURVEILANS : ASSESSMENT TOOLS
    - Stress Test
    - Banking Industry Rating & Risk Register
    - Risk Register
  6. PEMERIKSAAN
  7. PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
  8. **PENGAWASAN MONETER**

**Tujuan :**

- a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter.
- b. Mengurangi risiko di bidang moneter

**Tugas:**

**Pengawasan:**

- Surveilans (offsite)
- Pemeriksaan (on-site)

**Rekomendasi**

**Objek:**

Kepatuhan:

**Non-Bank (PPU,  
LPP, KUSTODIAN)**

**Bank**

**Instrumen:**

**Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valas**

Penyempurnaan Kerangka  
Kerja Pengawasan BI

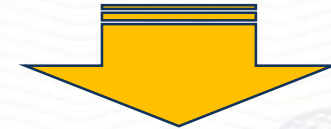
Kebijakan/ Ketentuan  
BI

Termasuk dalam cakupan  
kerangka pengawasan  
risiko sistemik



Giro Wajib Minimum  
Posisi Devisa Neto  
Utang Luar Negeri  
Liquidity Buffer  
Loan to Value  
Countercyclical Buffer

Termasuk dalam cakupan  
aspek kepatuhan & risiko lain



Pelaporan PPU,  
Swap Hedging, Local  
Currency Settlement  
(ACCD)  
Retail Payment (APMK,  
UE, LKD, PTD Bank)



# Metode Umum Pengawasan SP

## Pengamatan (*Monitoring dan Identifikasi*)

- Mengumpulkan dan menganalisis informasi :
- Laporan berkala
- Laporan insidentil
- Sumber informasi lainnya (institusi lain/asosiasi, pandangan pakar, pengguna jasa/konsumen, Info media)

## Penilaian (*Assessment*)

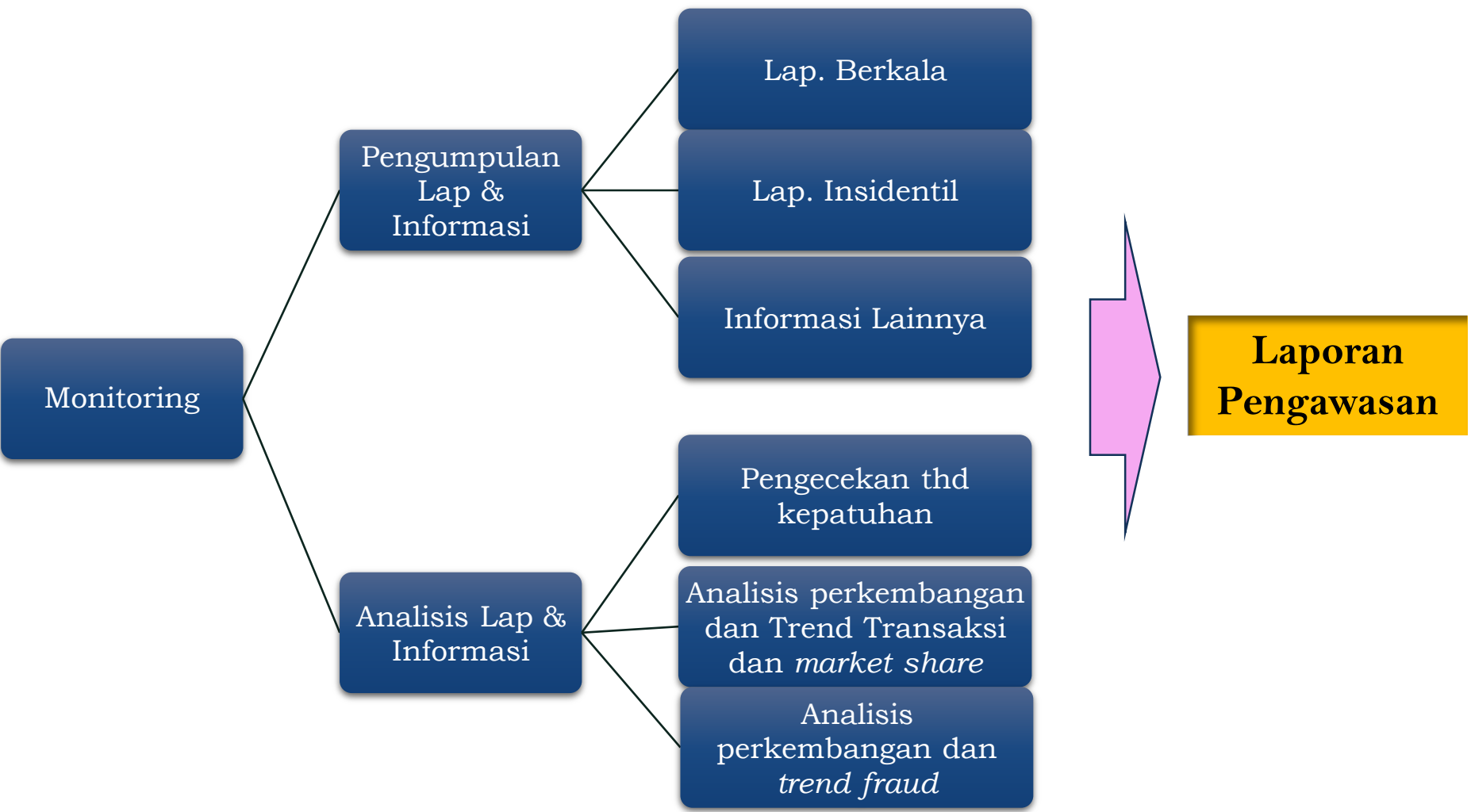
Memastikan *compliance* (kepatuhan) :

- *Compliance* terhadap *International Standard* (khususnya untuk SIPS : BI-RTGS dan BI-SSSS)
- *Compliance* terhadap aturan (APMK,Uang Elektronik, Transfer Dana)

## Upaya Mendorong Perubahan (*Inducing Change*)

- Pertemuan konsultatif
- Himbauan moral
- Public statement
- Penegakan sanksi

# Monitoring



# **Assessment** – melalui pemeriksaan (*on site visit*)

## Fokus Pemeriksaan

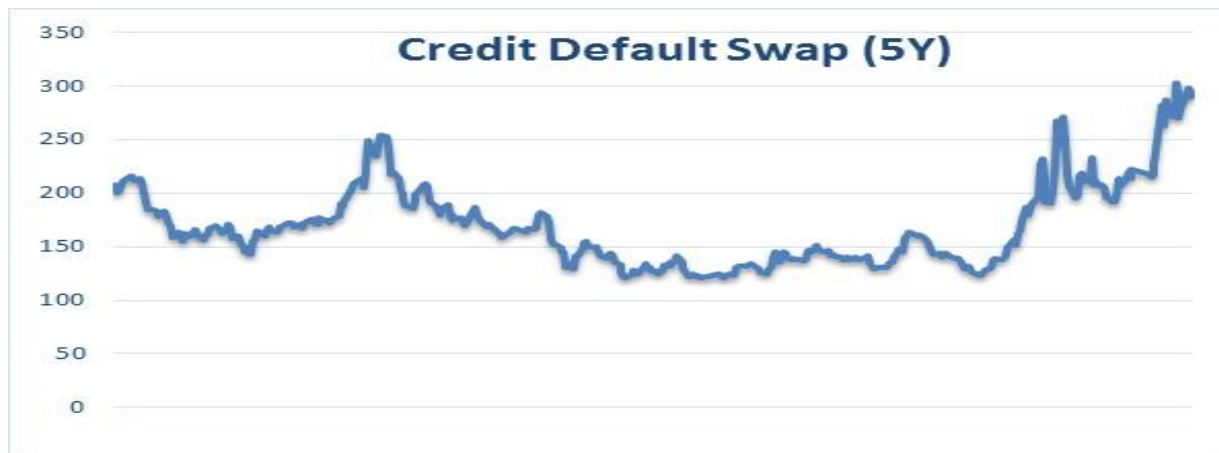
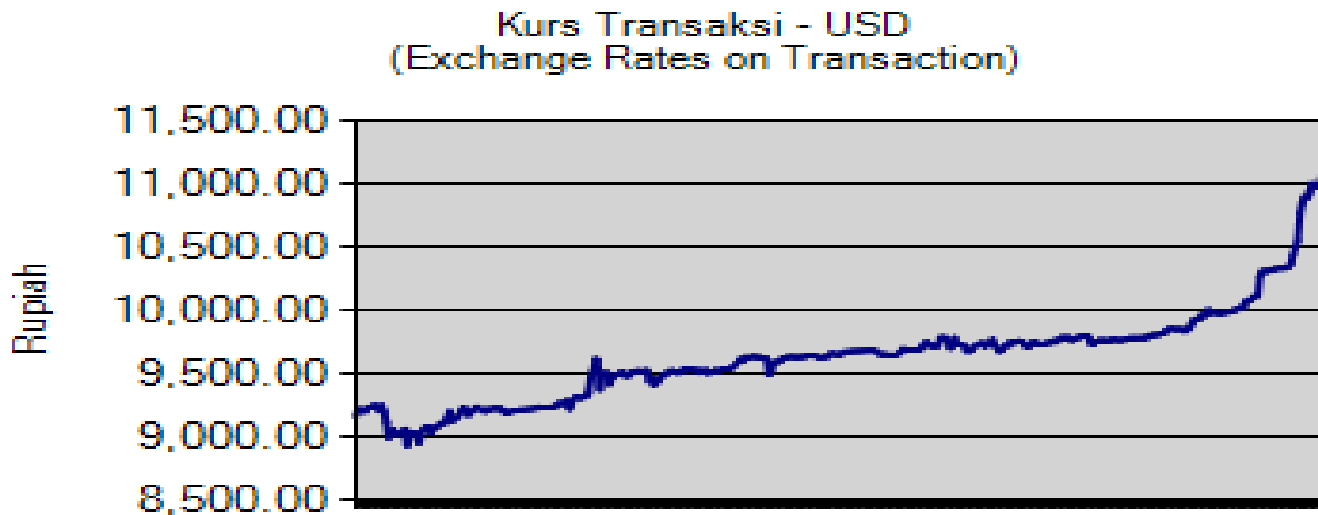
- Penerapan aspek manajemen risiko
- Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi laporan
- Penerapan aspek perlindungan nasabah

# DISKUSI GRUP

- Diskusi dilakukan dalam grup ( 4 – 5 orang)
- Maksimal waktu diskusi 30 menit
- Masing – masing grup menyampaikan resume singkat diskusi ( $\pm$  5 menit)
- Setiap grup melakukan :
  - a. Identifikasi potensi risiko (apabila ada)
  - b. Transmisi risiko yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.
  - c. Hal-hal yang perlu diperdalam dan/atau menjadi fokus pengawasan

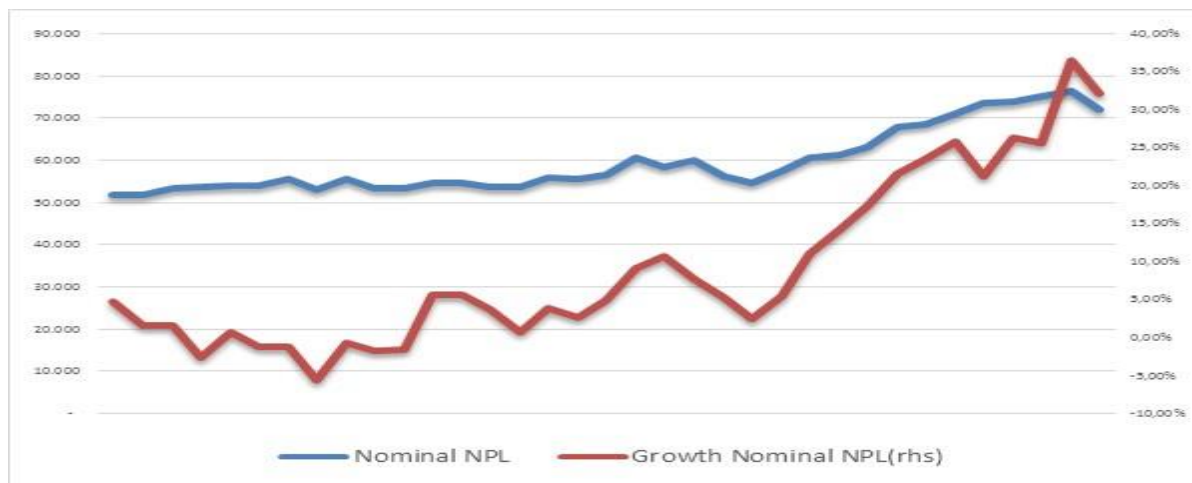
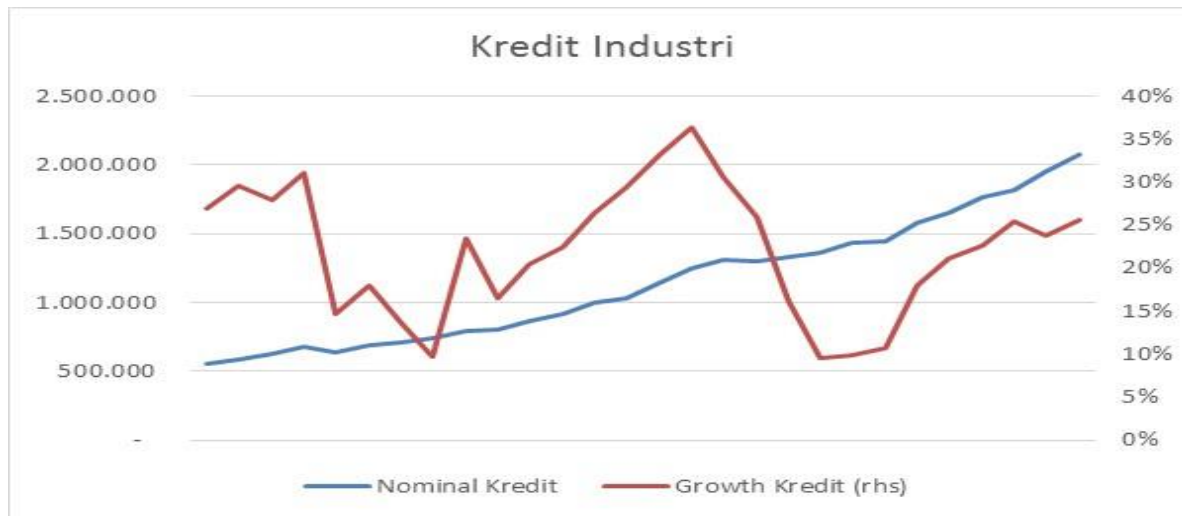
\* CDS : kontrak antara seller dan buyer dengan premi tertentu dan jangka waktu tertentu terkait kompensasi atas terjadinya suatu default (*credit event*)

# Data dan Informasi

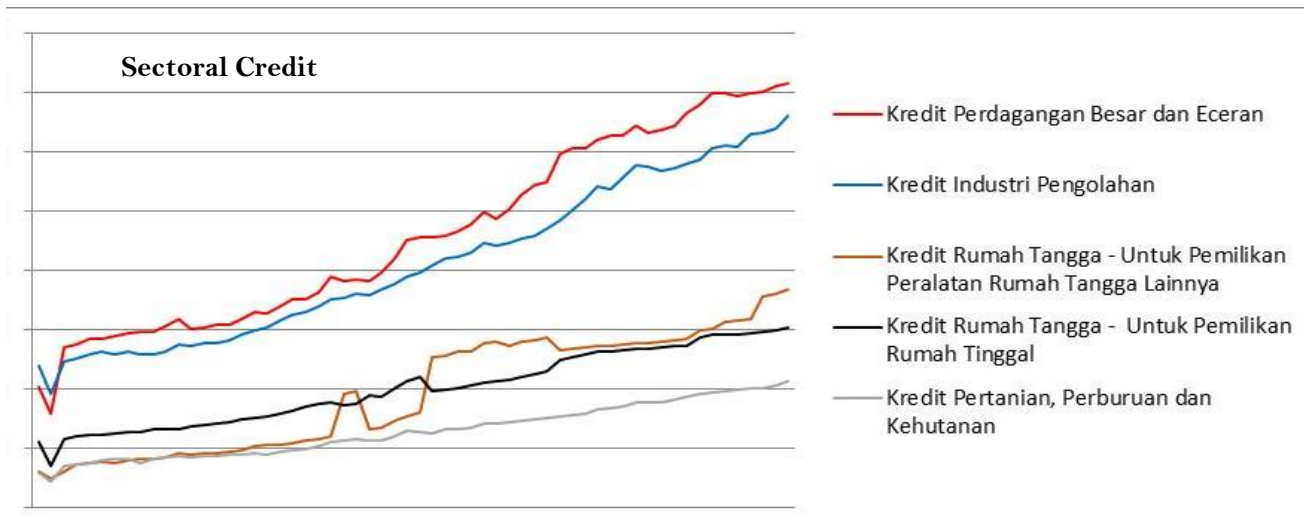
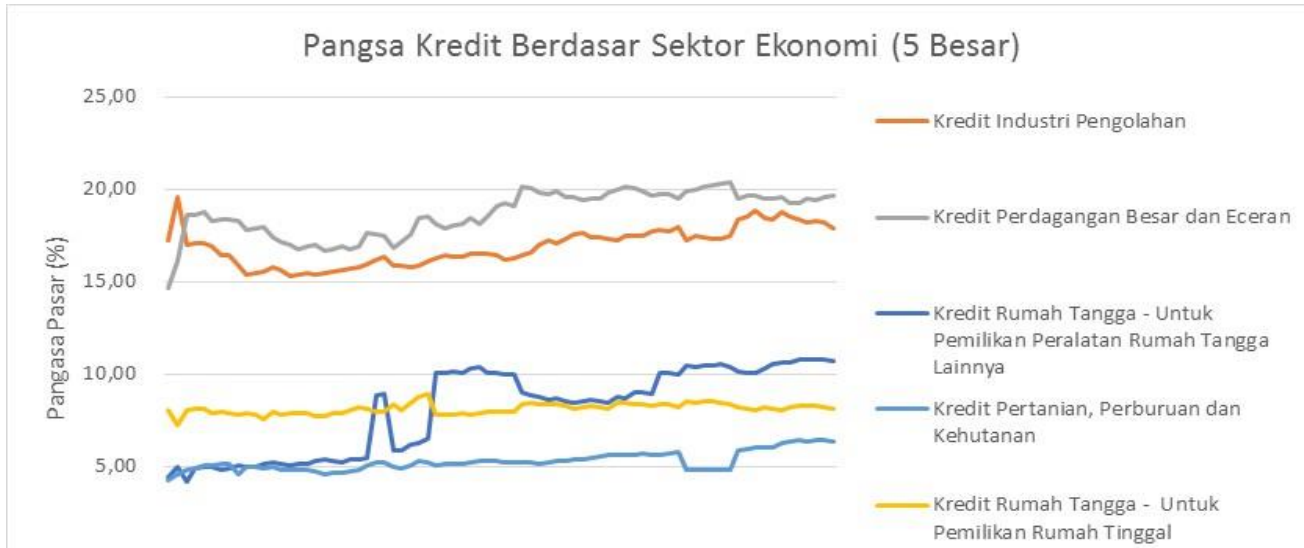


\* CDS : kontrak antara seller dan buyer dengan premi tertentu dan jangka waktu tertentu terkait kompensasi atas terjadinya suatu default (*credit event*)

# Data dan Informasi



# Data dan Informasi



THANK YOU

